



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDUNG 2022



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDUNG



<https://www.bps.kotabandung.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDUNG 2022



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDUNG

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDUNG 2021

ISSN	: 2797-3646
Katalog BPS	: 4102004.3273
Nomor Publikasi	: 3273.2006
Ukuran Buku	: B5 (17,6 x 25 cm)
Jumlah Halaman	: ix + 72 halaman
Naskah	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Ilustrasi Sampul	: Jalan Ciumbuleuit-Cidadap Kota Bandung (koleksi pribadi)
Diterbitkan oleh	: @Badan Pusat Statistik Kota Bandung
Dicetak oleh	: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Aris Budiyanto, S.ST, M.Si

Penyunting : Dra. Sri Sundari, MM

Penulis : Rahmawaty, S.Si, ME
Casmanto, SE, M.Si
Adong Hotma MH, SAP

Pengolah Data : Rahmawaty, S.Si, ME
Casmanto, SE, M.Si
Adong Hotma MH, SAP

Gambar Kulit, Desain dan *Layout* dan Infografis :

Rahmawaty, S.Si, ME
Casmanto, SE, M.Si
Adong Hotma MH, SAP
Ahmad Luthfi C, S.Si. MSP

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala karunia-Nya sehingga publikasi Indikator Statistik Kesejahteraan Tahun 2022 Kota Bandung berhasil disusun. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan yang kami susun guna menyajikan perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Bandung. Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan dengan data yang tersedia dan terukur. Adapun sumber data untuk publikasi ini yaitu Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020-2021, Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021 dan Publikasi Proyeksi Penduduk 2010-2020 Provinsi Jawa Barat.

Publikasi ini mencakup indikator kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, taraf dan pola konsumsi serta indikator sosial lainnya di Kota Bandung.

Kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Bandung, Desember 2022
Kepala BPS Kota Bandung,



Aris Budiyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Ruang Lingkup.....	2
1.2 Sistematika.....	2
1.3 Sumber Data.....	2
1.4 Konsep dan Definisi.....	3
BAB II KEPENDUDUKAN.....	8
2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	9
2.2. Sebaran dan kepadatan penduduk.....	10
2.3. Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan.....	12
2.4. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama.....	15
2.5 Penggunaan Alat/Cara KB.....	16
BAB III KESEHATAN.....	19
3.1. Derajat dan Status Kesehatan.....	20
3.2. Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	23
3.3. Kesehatan Ibu dan Balita.....	25
BAB IV PENDIDIKAN.....	29
4.1. Rata-rata Lama Sekolah.....	30
4.2. Partisipasi Pendidikan.....	34
4.3. Tingkat Pendidikan.....	37
BAB V KETENAGAKERJAAN.....	41
5.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran.....	41
5.2. Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan.....	46
5.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	48
5.4. Sektor Formal dan Sektor Informal.....	51
Bab VI PERUMAHAN.....	54
6.1. Kualitas Rumah Tinggal.....	55
6.2. Fasilitas Rumah Tinggal.....	56
6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal.....	58
BAB VII TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	60
7.1. Pengeluaran Rumah Tangga.....	60
7.2. Konsumsi Energi dan Protein.....	66
BAB VIII SOSIAL LAINNYA.....	71
8.1 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	71
8.2 Perlindungan Sosial.....	73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung, 2000-2020 (Persen).....	10
Grafik 2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Bandung, 2020 (Jiwa/Km ²).....	12
Grafik 3 Rasio Jenis Kelamin Kota Bandung, 2010-2020 (Persen)	13
Grafik 4. Umur Harapan Hidup Di Kota Bandung Dan Jawa Barat,.....	20
Grafik 5. Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan Yang Lalu Menurut Jenis Kelamin Di Kota Bandung, 2018-2020 (Persen).....	22
Grafik 6. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Dan Berobat Jalan Di Kota Bandung 2020 (Persen)	24
Grafik 7. Rata-Rata Lama Sekolah, Kota Bandung 2018-2020 (Tahun)	33
Grafik 8. Angka Harapan Lama Sekolah Di Kota Bandung Dan Jawa Barat,	34
Grafik 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Menurut Jenis Kelamin Di Kota Bandung, 2018-2020 (Persen).....	44
Grafik 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Menurut Jenis Kelamin Di Kota Bandung 2018-2020	45
Grafik 11. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Bandung 2020 (Persen).....	46
Grafik 12. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Di Kota Bandung 2020 (Persen).....	48
Grafik 13. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Satus Pekerjaan Utama Di Kota Bandung, 2018-2020 (Persen).....	49
Grafik 14. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Kegiatan Formal Dan Informal Di Kota Bandung 2018-2020 (Persen).....	52
Grafik 16. Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) Dan Protein (Gram) Per Kapita Sehari Di Kota Bandung, 2018-2020	67
Grafik 17. Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari Menurut Kelompok Pengeluaran Di Kota Bandung, 2020 (Kkal).....	68
Grafik 18. Rata-Rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari Di Kota Bandung, 2020 (Gram)	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bandung, 2000-2020 (Jiwa)	9
Tabel 2. Angka Beban Ketergantungan Kota Bandung, 2010-2020 (Persen)	14
Tabel 3. Persentase Perempuan Yang Pernah Kawin Di Kota Bandung, 2020 (Persen)	16
Tabel 4. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara Kb Di Kota Bandung, 2020 (Persen).....	17
Tabel 5. Angka Kesakitan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Di Kota Bandung 2018-2020.....	23
Tabel 6. Persentase Perempuan Umur 15-49 Tahun Yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Penolong Proses Kelahiran Terakhir Di Kota Bandung, 2018 – 2020 (Persen)....	26
Tabel 7. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin Yang Pernah Melahirkan Dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Terakhir Di Kota Bandung, 2018-2020 (Persen)	27
Tabel 8. Angka Harapan Lama Sekolah (Eys) Dan Rata-Rata Lama Sekolah (Mys)	31
Tabel 9. Angka Harapan Lama Sekolah (Eys) Dan Rata-Rata Lama Sekolah (Mys) (Tahun), Kota Bandung 2018 - 2020	32
Tabel 10. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik Dan Status Pendidikan, Kota Bandung 2020.....	35
Tabel 11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Tertinggi, Kota Bandung 2020 (Persen)	37
Tabel 12. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Dan Kelompok Pengeluaran, Kota Bandung 2020 (Persen)	38
Tabel 13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Kota Bandung, 2018-2020 (Persen)	43
Tabel 14. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Di Kota Bandung 2019 -2020 (Persen)	55
Tabel 15. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Di Kota Bandung 2018-2020 (Persen)	57
Tabel 16. Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tangga Di Kota Bandung 2019-2020 (Persen)	58
Tabel 17. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran Di Kota Bandung, 2018-2020	61
Tabel 18 Rata-Rata Persentase Pengeluaran Makanan Per Kapita Per Bulan	64
Tabel 19. Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran Di Kota Bandung, 2020 (Rupiah)	65
Tabel 20 Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun Ke Atas Yang Mengakses Internet 3 Bulan Terakhir Menurut Karakteristik Di Kota Bandung, 2019-2020	72
Tabel 21. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial Yang Diterima Di Kota Bandung, 2019-2020 (Persen).....	74



BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan perwujudan pelaksanaan pencapaian tujuan yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dasar ini dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat. Untuk itu, pemerintah melaksanakan pembangunan nasional yang dituangkan dalam rencana pembangunan yang pada akhirnya diimplementasikan dalam program-program pembangunan.

Sebagai bagian dalam masyarakat internasional, Indonesia telah menyepakati untuk mengadopsi standar dan norma yang berlaku secara internasional. Pendekatan terpadu sasaran-sasaran pembangunan yang lebih konkret, terukur dan kuantitatif secara universal tercantum dalam tujuan pembangunan yang tercetus dalam SDGs (*Sustainable development Goals*). SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (hingga tahun 2030) guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh Negara (universal), sehingga seluruh Negara tanpa kecuali Negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs.

Data dan informasi mengenai keadaan masyarakat setiap tahunnya merupakan hal penting dalam pembangunan. Salah satu informasi yang terkait dengan pembangunan yaitu gambaran keadaan masyarakat mengenai kehidupan sosial ekonominya. Ketersediaan indikator sosial dari suatu daerah sangat diperlukan untuk mengarahkan dan mengevaluasi pembangunan agar tepat sasaran dan efisien.

Publikasi atau gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat ini diharapkan mampu memberikan gambaran sejauh mana perkembangan kesejahteraan penduduk yang telah dicapai, sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Isi Indikator Kesejahteraan Rakyat ini masih bersifat makro mengingat dimensi cakupan kesejahteraan



yang sedemikian luasnya. Namun demikian, publikasi ini diharapkan banyak membantu dalam analisis sosial ekonomi kesejahteraan penduduk di Kota Bandung.

1.1 Ruang Lingkup

Tingkat kesejahteraan rakyat meliputi kesejahteraan materil dan non materil. Kesejahteraan materil meliputi pendapatan, kepemilikan harta benda, termasuk keadaan fisik rumah tempat tinggal bersama fasilitasnya. Sedangkan kesejahteraan non materil meliputi keadaan pendidikan, kesehatan, kebersihan dan lain lain.

Pembahasan dalam publikasi ini, tidak saja yang bersifat materil tetapi juga yang bersifat non materil. Karena tidak semua aspek non materil dapat diukur, sehingga yang dibahas hanya masalah sosial dan demografi yang dapat diukur dan dianggap penting sebagai komponen yang dominan berpengaruh dalam menentukan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat.

1.2 Sistematika

Indikator kesejahteraan Kota Bandung tahun 2020 ini terdiri dari 7 kelompok yakni Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Perumahan, Taraf dan Pola konsumsi , serta sosial lainnya yang digambarkan dalam tabel dan gambar/grafik beserta uraiannya yang disajikan secara terpisah dan dalam bab masing masing.

1.3 Sumber Data

Sumber data yang disajikan dalam pembuatan publikasi Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021 ini yaitu data sekunder hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 dan 2021 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021 yang dikumpulkan secara primer oleh petugas BPS.



1.4 Konsep dan Definisi

Rumah Tangga

Seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama dan makan satu dapur. Yang dimaksud makan satu dapur adalah jika pengurusan makan sehari harinya dikelola menjadi satu.

Kepala Rumah Tangga

Seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk oleh anggota rumah tangga bersangkutan sebagai kepala rumah tangga.

Anggota Rumah Tangga

Semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah tangga waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih ,dianggap bukan sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang tinggal di rumah tangga kurang 6 bulan tetapi berniat pindah/bertempat tinggal di rumah tangga tersebut 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Sekolah

Kegiatan bersekolah di sekolah formal (negeri dan swasta) baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

Tidak/belum pernah sekolah

Mereka yang tidak mau atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak kanak yang tidak melanjutkan ke SD.

Masih bersekolah

Mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar,menengah atau tinggi.



Tidak sekolah lagi

Mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan)

Jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah

Proporsi dari seluruh penduduk dari berbagai kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Keluhan Kesehatan

Keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau gangguan kejiwaan, baik karena karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, criminal atau hal lain.

Imunisasi

Memasukkan kuman penyakit yang sudah dimatikan kedalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

Angkatan Kerja

Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan atau mencari pekerjaan.

Penduduk Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.





Bekerja

Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit satu jam dalam seminggu. Bekerja dalam satu jam tersebut harus dilakukan berturut turut tidak terputus.

Jenis Pekerjaan

Macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang.

Lapangan Pekerjaan

Bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha /perusahaan/ instansi tempat seorang bekerja.

Status Pekerjaan

Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaannya.

Pekerjaan Utama

Pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak pada referensi waktu survey seminggu yang lalu dan bukan biasanya (*usually*)

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah dapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Mencari Pekerjaan

Kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

Setengah Penganggur

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur terdiri dari :



- Setengah penganggur terbuka adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- Setengah penganggur sukarela adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*)

Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan

Jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal hal diluar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap).

Dinding

Sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

Atap

Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami dibawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Pengeluaran rata rata per kapita

Rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah





Pendahuluan

tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata rata sebulan.

<https://bandungkota.bps.go.id>



BAB II KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan dasar dan tujuan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan didasarkan dengan kondisi demografi yang ada. Dengan demikian program pembangunan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan. Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023, penduduk adalah titik sentral dalam pembangunan karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan.

Kondisi demografi di sebuah wilayah akan mempengaruhi bagaimana dan sejauh mana pembangunan tersebut dapat dilakukan. Jumlah penduduk merupakan salah satu modal pembangunan karena dengannya pembangunan dapat bergerak. Kondisi demografi lainnya seperti komposisi penduduk, distribusi penduduk, rasio jenis kelamin dan sebagainya akan menentukan program dan kebijakan dasar yang harus diambil dalam proses pembangunan.

Dalam penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan tersebut, diperlukan data kependudukan yang akurat dan terkini. Pembangunan tanpa didasari oleh data membutuhkan biaya yang lebih besar. Keberadaan data kependudukan sangat penting supaya arah pembangunan menjadi jelas dan terarah.

Penduduk yang berkualitas adalah penduduk yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, ditandai dengan kondisi ideal dimana jumlah penduduknya terkendali, terpenuhinya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dengan layak, memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas.

Informasi kependudukan merupakan data strategis yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Pertumbuhan dan sebaran penduduk serta urbanisasi dan migrasi penduduk di Kota Bandung menjadi permasalahan utama. Dengan adanya informasi strategis ini, diharapkan Pemerintah dapat membuat kebijakan dan program





yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Parameter kependudukan yang akan dibahas pada bab ini adalah jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, sex ratio, persebaran dan kepadatan penduduk, beban ketergantungan, rata-rata usia perkawinan pertama, dan penggunaan alat/cara KB.

2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2021 adalah sebesar 2.452.943 jiwa, terdiri dari 1.235.134 penduduk laki-laki dan 1.217.809 penduduk perempuan. Penduduk Kota Bandung mencakup 5,03 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat. Kota Bandung merupakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar kesembilan di Jawa Barat. Sedangkan di wilayah Bandung Raya, Kota Bandung merupakan kota/kabupaten dengan penduduk kedua terbesar setelah Kabupaten Bandung.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bandung, 2016 - 2021 (Jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk
(1)	(2)
2000	2.136.260
2010	2.394.873
2020	2.444.160
2021	2.452.943

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2000, 2010, dan 2020, dan Proyeksi Interim 2020- 2023 BPS

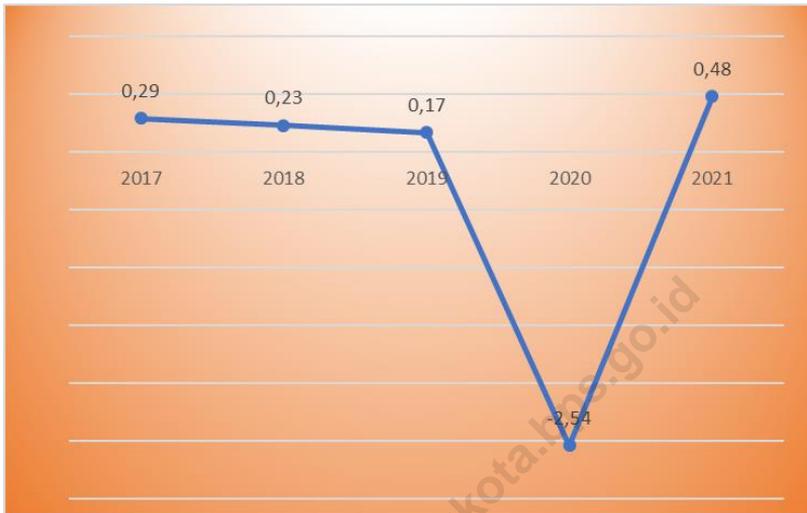
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandung tahun 2021 adalah sebesar 0,48 persen. Laju ini mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan kondisi tahun 2020. Penduduk Kota Bandung di tahun 2020 sempat mengalami penurunan di tahun 2020

Kependudukan



akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian penduduk di Kota Bandung meninggalkan Kota Bandung akibat terhambatnya kegiatan ekonomi di Kota Bandung.

Grafik 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung, 2017-2021 (persen)



Sumber : Proyeksi Penduduk 2021 – 2020, SP 2020, Proyeksi Interim

Di tahun 2021 jumlah penduduk Kota Bandung kembali mengalami pertumbuhan. Sejalan dengan kembali tumbuhnya aktivitas ekonomi di Kota Bandung, jumlah penduduk di Kota Bandung pun kembali meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor migrasi dari luar Kota Bandung ke Kota Bandung sangat mempengaruhi situasi kependudukan di Kota Bandung. Migrasi penduduk ke Kota Bandung disebabkan karena beberapa faktor, seperti pekerjaan dan pendidikan. Pulihnya kegiatan ekonomi di Kota Bandung ditandai dengan kembali beraktivitasnya kegiatan industri yang kembali mempekerjakan penduduk yang sebelumnya mengalami pemberhentian atau pengurangan pegawai. Demikian pula dengan kegiatan pendidikan yang berangsur menerapkan kembali sistem tatap muka, kembali menarik mahasiswa luar Kota Bandung untuk kembali tinggal di Kota Bandung.

2.2. Sebaran dan kepadatan penduduk

Secara administratif, Kota Bandung terbagi ke dalam 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Bandung adalah





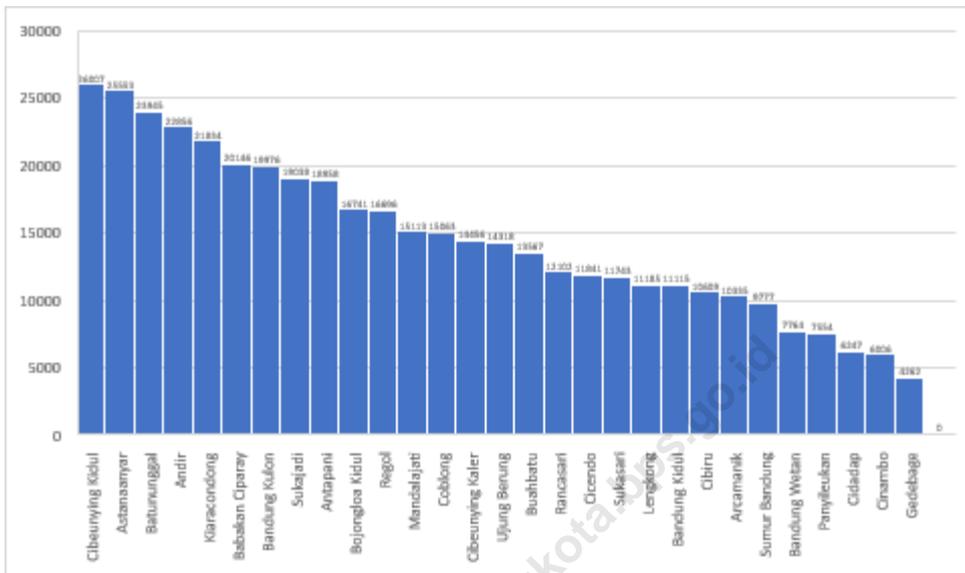
Kecamatan Babakan Ciparay, yaitu mencakup 5,81 persen penduduk Kota Bandung. Empat kecamatan lainnya dengan jumlah penduduk terbesar secara berurutan adalah Bandung Kulon, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Bojongloa Kaler, dan Kecamatan Batununggal. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Cinambo di mana penduduknya mencakup 1,04 persen penduduk Kota Bandung.

Kepadatan penduduk Kota Bandung tahun 2021 mencapai 14.661 jiwa per km². Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 38.267 penduduk per km². Empat kecamatan lain dengan kepadatan penduduk tertinggi secara berurutan adalah Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Astananyar, Kecamatan Batununggal, dan Kecamatan Andir. Ada enam kecamatan di Kota Bandung yang memiliki tingkat kepadatan penduduk di bawah 10.000 penduduk per km² yaitu Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Cidadap, Cinambo, dan Kecamatan Gedebage. Kepadatan penduduk terkecil ada di kecamatan Gedebage dengan kepadatan 4.262 penduduk per km².

Jumlah penduduk yang menghuni suatu daerah akan turut menentukan program pembangunan. Semakin besar jumlah penduduk yang berada di suatu wilayah maka akan semakin besar pula sarana pendukung yang diperlukan. Dengan luas wilayah yang relatif tidak terlalu besar, daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Bandung menunjukkan adanya jumlah penduduk yang cukup besar yang tinggal dalam suatu wilayah yang relatif kecil. Kebutuhan sarana perumahan, kesehatan, kebersihan dan sarana umum lainnya di daerah ini akan besar.



Grafik 2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bandung, 2021 (jiwa/km²)



Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kota Bandung

2.3. Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah. Pada tahun 2021, rasio jenis kelamin Kota Bandung adalah sebesar 101,4 dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1,23 juta dan perempuan sebanyak 1,22 juta jiwa. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki sekitar 17 ribu lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Rasio jenis kelamin sebesar 101,4 menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan di Kota Bandung, maka terdapat sekitar 101 jiwa penduduk laki-laki. Dari grafik 3 terlihat bahwa pada tahun 2000 rasio jenis kelamin Kota Bandung adalah 101,03. Pada dekade berikutnya yaitu tahun 2010 rasio jenis kelamin sebesar 103,04 menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Pada tahun 2020 rasio jenis kelamin menurun mencapai 101,49. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan semakin



lama semakin berimbang. Dari Grafik 3 terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, rasio jenis kelamin di Kota Bandung relatif menurun.

Grafik 3 Rasio Jenis Kelamin Kota Bandung, 2017-2021 (persen)



Sumber : Proyeksi Penduduk BPS, Hasil SP2020

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) tidak hanya digunakan untuk melihat seberapa besar beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif tetapi juga dijadikan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Persentase angka beban



ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Angka Beban Ketergantungan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Angka Beban Ketergantungan Kota Bandung, 2017 - 2021 (persen)

Tahun	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(3)
2017	39,39
2018	38,32
2019	38,27
2020	41,80
2021	41,81

Sumber : Ptoyeksi Penduduk BPS, Hasil SP2020, diolah

Semakin besar angka beban ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dan semakin besar pula upaya dan hambatan yang harus dilakukan dan ditangani oleh pemerintah.

Rasio Ketergantungan di Kota Bandung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, angka beban rasio ketergantungan Kota Bandung adalah sebesar 39,39 dan menurun di tiga tahun berikutnya. Di tahun 2020, rasio ketergantungan di Kota Bandung mengalami kenaikan hingga mencapai 41,80 persen. Ini menunjukkan bahwa di tahun 2020 dan 2021 setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.





Jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan peluang bagi daerahnya. Potensi penduduk usia produktif yang cukup besar dapat dioptimalkan agar dapat menjadi aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, jumlah penduduk produktif yang tinggi mungkin dapat menyebabkan timbulnya beragam permasalahan penduduk seperti tingginya pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan pemukiman kumuh. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih produktif, cerdas dan berkarakter sehat yang dapat menjadi modal pembangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun dan untuk perempuan harus sudah berusia 16 tahun. Pasal 6 ayat 2 berbunyi, jika menikah di bawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali.

Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama idealnya adalah umur 21 hingga 25 tahun. Rekomendasi BKKBN sesuai dengan hak pendidikan 12 tahun, juga diharapkan ketika menikah sudah memiliki kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi serta kemapanaan material dan mencegah meningkatnya pernikahan anak.

Usia perkawinan pertama dapat menjadi salah satu pemicu pertambahan jumlah penduduk, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya.



Tabel 3. Persentase Perempuan Yang Pernah Kawin dan Umur Perkawinan Pertama di Kota Bandung, 2021 (persen)

Umur	Persentase
(1)	(2)
< 19	23,68
19+	76,32
Jumlah	100

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, 2021

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, sebagian perempuan di Kota Bandung melakukan perkawinan pertama pada umur di atas 21 tahun.

Perkawinan perempuan usia dibawah 16 tahun masih kerap terjadi di Kota Bandung. Perkawinan perempuan dibawah umur masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Banyak dampak buruk dari terjadinya pernikahan anak. Selain dampak psikologis dari seseorang yang belum dewasa dan siap untuk menikah, dapat menyebabkan tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, angka kematian ibu dan anak dapat meningkat seiring terjadinya kehamilan di usia muda dan minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi.

2.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan berbagai macam alat kontrasepsi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.



Terdapat berbagai macam jenis alat/cara KB. Menurut masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu alat kontrasepsi hormonal dan permanen. Alat kontrasepsi hormonal umumnya mengandung kombinasi progesterin dan estrogen, atau progesteron saja. Alat kontrasepsi yang dapat digunakan dalam bentuk pil KB, suntik KB, implan, *Intra Uterine Device* (IUD), kondom dan lainnya. Biasanya digunakan untuk menunda dan mengatur jarak kehamilan yang memiliki masa kerja bersifat sementara baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan kontrasepsi permanen atau sterilisasi biasanya digunakan untuk perempuan yang tidak lagi menginginkan kehamilan karena faktor kesehatan, usia atau jumlah anak yang telah dilahirkan. Biasanya digunakan alat kontrasepsi seperti tubektomi/MOW, ligasi tuba, implan tuba, dan elektrokoagulasi tuba, sedangkan pada lelaki dapat dilakukan vasektomi/MOP.

Persentase perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun di Kota Bandung berstatus sedang menggunakan alat/cara KB adalah sebesar 49,69 persen dan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di Kota Bandung telah mengikuti himbauan pemerintah dan merasakan pentingnya untuk mengatur kelahiran. Sebesar 40,24 persen wanita pernah kawin tidak menggunakan KB. Kondisi perempuan yang berstatus pernah kawin dan tidak menggunakan alat/cara KB dimungkinkan karena berstatus perkawinan cerai, sedang dalam kondisi hamil, sedang berprogram untuk memiliki anak atau pun mengalami keluhan dengan alat KB.

Tabel 4 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kota Bandung, 2021 (persen)

Penggunaan Alat/Cara KB	Persentase
(1)	(2)
Pernah Menggunakan	10,07
Sedang Menggunakan	49,69
Tidak Menggunakan	40,24
Jumlah	100

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2020

Kependudukan



Pelaksanaan program KB merupakan sebuah salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga nantinya dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Program KB mengatur jarak kelahiran yang memungkinkan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian orang tua dapat lebih mempersiapkan dirinya dalam memiliki anak sehingga diharapkan anak akan tumbuh dalam lingkungan yang lebih berkualitas dan menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, tangguh dan berkualitas.

<https://bandungkota.bps.go.id>



BAB III KESEHATAN

Menurut Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif dan ekonomis. Kesehatan sangat berkaitan dengan aktifitas manusia. Suatu kegiatan akan lebih berkualitas bila dilakukan dalam kondisi yang sehat.

Kesehatan merupakan salah satu aspek dalam kesejahteraan. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Aspek kesehatan tercakup pula dalam tujuan ketiga dalam *The 2030 for the Sustainable Development Goals* atau Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan nomer tiga tersebut adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Dengan demikian negara yang menyepakati SDGs sebagai salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan bersepakat bahwa aspek kesehatan memerlukan perhatian dan penanganan yang baik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap daerah membuat program dan strategi. Dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah 1) Meningkatkan kualitas lingkungan sehat, 2) Meningkatkan budaya hidup sehat; dan 3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat

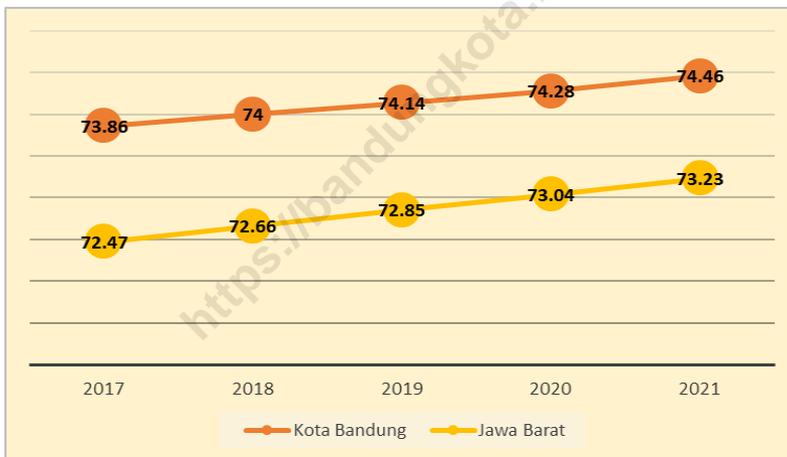


jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

3.1. Derajat dan Status Kesehatan

Salah satu parameter untuk mengukur derajat kesehatan suatu wilayah adalah Umur Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin tinggi UHH berarti semakin rendah angka kematian. UHH digunakan sebagai indikator derajat kesehatan penduduk dan kemampuan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan, terpenuhinya kecukupan gizi dan kalori penduduk, dan kesehatan lingkungan yang baik.

Grafik 4. Umur Harapan Hidup di Kota Bandung dan Jawa Barat, 2016-2021 (Tahun)



Sumber : BPS

UHH Kota Bandung tahun Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat terlihat meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 UHH di Kota Bandung sebesar 73,86 Tahun. Angka UHH terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2021 angka UHH Kota Bandung berada dinilai 74,46. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Bandung memiliki harapan hidup hingga di umur 74 tahun. Kota Bandung juga memiliki UHH yang lebih tinggi dibandingkan dengan UHH di Provinsi Jawa Barat. UHH di Jawa Barat tahun 2021



adalah 73,23 tahun, lebih rendah sekitar 1 tahun dibandingkan dengan UHH di Kota Bandung.

Peningkatan angka usia harapan hidup menunjukkan bahwa akses kesehatan untuk masyarakat di Kota Bandung semakin baik. Kemudahan pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, serta ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, peningkatan angka usia harapan hidup juga menunjukkan bahwa akses terhadap pemenuhan gizi di masyarakat semakin baik. Selain itu masyarakat semakin paham dalam menjalani perilaku hidup bersih dan sehat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Untuk melihat derajat dan status kesehatan masyarakat di Kota Bandung, tidak hanya melalui usia harapan hidup, melainkan juga melalui bagaimana tingkat morbiditas di masyarakat. Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Tingkat Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan atau keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

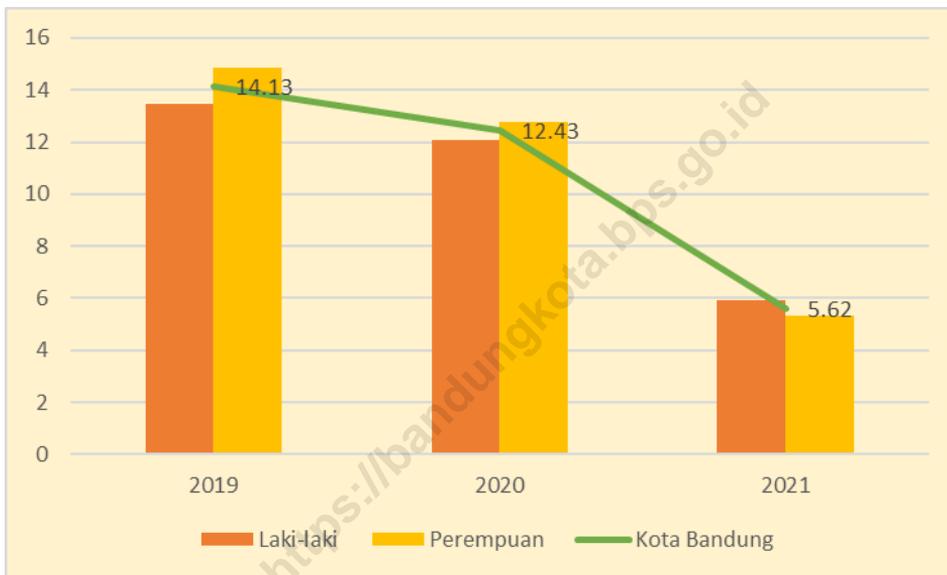
Dalam tiga tahun terakhir, angka kesakitan penduduk di Kota Bandung terlihat menurun. Pada tahun 2021 angka kesakitan di Kota Bandung adalah sebesar 5,62 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di tahun 2020 di mana angka kesakitan Kota Bandung adalah sebesar 12,43 persen.

Jika dilihat dari kategori jenis kelamin, angka kesakitan atau tingkat morbiditas penduduk laki-laki dan penduduk perempuan selalu berbeda setiap tahunnya. Di tahun 2021 angka morbiditas laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan angka morbiditas



perempuan. Angka morbiditas untuk penduduk laki-laki di Kota Bandung di tahun 2021 adalah sebesar 5,91 dan 5,32 untuk penduduk perempuan. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya di mana angka morbiditas penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Di tahun 2020 angka morbiditas untuk penduduk laki-laki adalah sebesar 12,09 dan 12,77 untuk penduduk perempuan.

Grafik 5. Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Sebulan yang Lalu Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung, 2019-2021 (Persen)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung 2019-2021

Bila ditinjau dari kelompok pengeluaran penduduk Kota Bandung, tidak telalu terdapat perbedaan yang berarti dari kesakitan yang diderita oleh setiap kelompok pendapatan yang berarti. Angka kesakitan berdasarkan kelompok pengeluaran dapat dilihat di tabel 5.

Tabel 5. Angka Kesakitan Berdasarkan kelompok Pengeluaran di Kota Bandung 2019-2021

Kelompok Pengeluaran	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
40 persen terbawah	13,05	9,42	4,60
40 persen tengah	15,51	16,06	6,31
20 persen atas	13,52	11,17	6,27
Kota Bandung	14,13	12,43	5,62

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2019-2021

Pada tahun 2021 kelompok 40 persen tengah merupakan kelompok dengan angka kesakitan terbesar dibandingkan dengan kelompok lainnya. Sedangkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terbawah merupakan kelompok dengan angka morbiditas terendah. Kondisi ini relatif sama dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 dan 2020.

3.2. Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Undang-undang Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Dari Kota Bandung Dalam Angka 2021, Kota Bandung memiliki sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, di antaranya 28 rumah sakit, 10 rumah sakit bersalin, 123 poliklinik, 71 puskesmas, 4 puskesmas pembantu, dan 138 apotek. Selain itu terdapat pula posyandu dan praktek bidan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bandung.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, Kota Bandung memiliki sejumlah tenaga kesehatan. Pada tahun 2021 di Kota Bandung terdapat 6.078 dokter, 2.278 dokter gigi, 8.481 perawat, 1.377 bidan, dan 1.510 tenaga kefarmasian. Selain itu terdapat pula 194

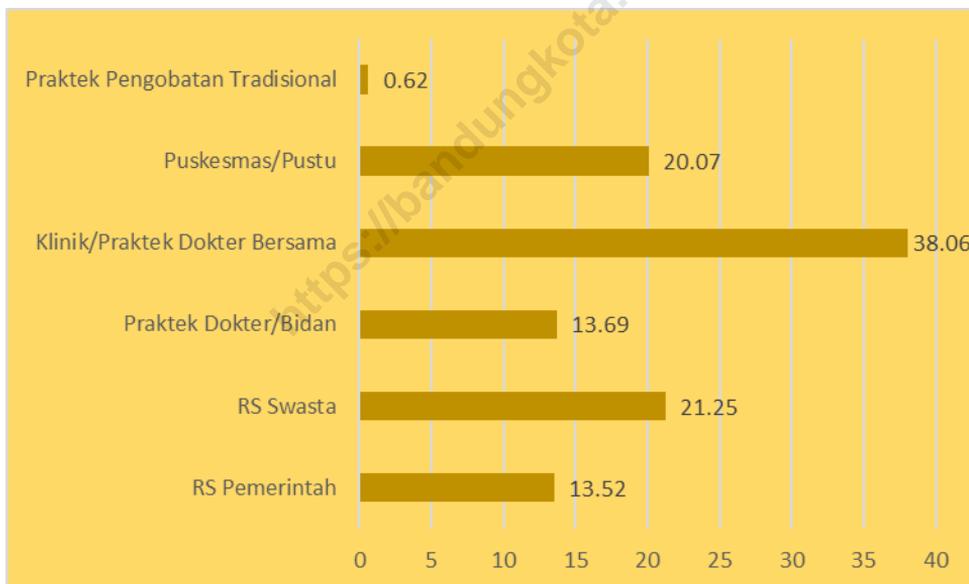
Kesehatan



tenaga kesehatan masyarakat, 133 tenaga kesehatan lingkungan, 222 tenaga gizi, dan 840 ahli teknologi laboratorium medik.

Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan akan terbantu mendapat pelayanan kesehatan dengan keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan. Dari data Susenas 2021 diketahui bahwa 13,21 persen penduduk Kota Bandung yang mengalami keluhan kesehatan mengunjungi puskesmas untuk berobat jalan. Klinik atau praktek dokter bersama dikunjungi oleh 26,74 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Sedangkan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta dikunjungi oleh masing-masing 8,0 dan 15,48 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

Grafik 6. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan di Kota Bandung 2021 (Persen)



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat 2021

Namun demikian tidak semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mengunjungi sarana kesehatan untuk berobat jalan. Dari hasil Susenas 2021, hanya 42,71 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan di



fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Pada tahun 2021 terdapat 10,68 persen penduduk di Kota Bandung yang mengalami keluhan tapi merasa tidak perlu untuk berobat.

Ada beberapa alasan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan memilih tidak melakukan berobat jalan. Alasan paling utama yaitu penduduk mengobati sendiri sebanyak 59,45 persen. Selain itu, sebanyak 36,04 persen penduduk merasa tidak perlu berobat jalan. Terdapat 1,57 persen penduduk di Jawa Barat yang mengalami keluhan kesehatan namun tidak berobat jalan disebabkan karena tidak punya biaya berobat. Sebanyak 0,47 persen penduduk juga tidak berobat karena tidak ada biaya untuk transportasi menuju fasilitas kesehatan. Hal ini perlu dievaluasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap fasilitas kesehatan. Selain dari adanya transportasi yang mudah untuk menuju fasilitas kesehatan, diperlukan juga adanya sarana kesehatan yang memadai hingga tingkat terkecil. Hal ini bisa dilakukan dengan menambahkan puskesmas, atau puskesmas pembantu untuk daerah yang masih belum ada fasilitas kesehatannya.

3.3. Kesehatan Ibu dan Balita

Kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan balita merupakan salah satu target dalam SDGs di sektor kesehatan. Diharapkan pada tahun 2030, dapat mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kematian hidup. Juga diharapkan pada tahun 2030 dapat mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita per 25 per 1.000.¹

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau

¹ Target 3.1 dan 3.2 dari SDGs



pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup (*Profil Kesehatan Indonesia 2018*)

Upaya untuk menurunkan AKI dapat dilakukan dengan menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas dan pemahaman mengenai kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Upaya yang dapat dilakukan dapat berupa pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis yang memiliki kualifikasi dan terampil dalam membantu proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase tenaga penolong dan fasilitas tempat persalinan yang digunakan. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan mampu memperluas akses, meningkatkan sarana prasarana pelayanan, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pelayanan kesehatan.

Tabel 6. Persentase Perempuan Umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kota Bandung, 2021 (Persen)

Penolong Persalinan	2021
(1)	(4)
Tenaga Medis	42,73
Perawat/Bidan	55,96
Non Tenaga Kesehatan	1,30
Jumlah	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2021



Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa sebagian besar wanita usia 15-49 yang melahirkan di Kota Bandung ditolong oleh perawat/bidan dalam menangani proses kelahiran terakhirnya. Persentase bidan sebagai penolong proses kelahiran terakhir mencapai 55,96 persen. Sebanyak 42,73 persen wanita melahirkan dengan bantuan tenaga medis. Penanganan kelahiran di Kota Bandung tahun 2021 tidak sepenuhnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sebagian kecil penduduk masih memanfaatkan jasa non tenaga kesehatan dalam menolong proses persalinan.

Sedangkan jika dilihat dari tempat melahirkannya, persentase perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 7. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin Yang Pernah Melahirkan Dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Terakhir di Kota Bandung, 2021 (Persen)

Tempat Melahirkan	2021
(1)	(4)
Fasilitas Kesehatan	96,62
Rumah	3,38
Lainnya	0
Jumlah	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2021

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 sebanyak sebagian besar perempuan umur 15-49 yang pernah melahirkan di Kota Bandung melahirkan di fasilitas kesehatan.

Kesehatan bayi yang baru dilahirkan juga merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu parameter yang diukur pada saat bayi baru lahir adalah berat badan. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2,5 kg dianggap beresiko mengalami gangguan kesehatan yang nantinya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.



Dari data SUSENAS 2021 diketahui bahwa seluruh bayi lahir hidup di Kota Bandung sudah dilakukan penimbangan berat badan saat lahir. Terdapat 85,37 persen berat anak lahir hidup di Kota Bandung di atas 2,5 kg. Namun demikian masih terdapat 14,23 persen bayi yang dilahirkan dengan berat lahir di bawah 2,5 kg. Berat bayi lahir yang kurang dari 2,5 kg dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, di antaranya gangguan kesehatan saat ibu hamil, kekurangan asupan nutrisi baik bagi ibu ataupun bayi saat proses kehamilan, ataupun terdapat gangguan kesehatan pada ibu hamil. Untuk itu diperlukan pemeriksaan yang rutin dan berkualitas selama proses kehamilan.

Dalam melihat kesehatan bayi dan balita, keberhasilan program imunisasi dari pemerintah dan keberlanjutan pemberian ASI perlu dilakukan. Salah satu upaya pemerintah memiliki program imunisasi terjadwal. Imunisasi dilakukan untuk meningkatkan ketahanan tubuh pada anak hingga terhindar dari penyakit yang berbahaya. Pada tahun 2021, di Kota Bandung tercatat 66,31 persen balita telah mendapat imunisasi lengkap dan masih terdapat 33,69 bayi dan balita yang imunisasinya belum lengkap. Dilihat dari keberlanjutan pemberian ASI, rata-rata lama pemberian ASI untuk bayi dan balita di Kota Bandung adalah 10,77 bulan, sedikit lebih tinggi rata-rata lama pemberian ASI di Jawa Barat yang sebesar 10,72 bulan.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang terampil dan terakreditasi serta fasilitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga upaya penguatan kesehatan dasar yang berkualitas melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dapat terwujud.





BAB IV PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendidikan merupakan hak dasar warga negara Indonesia. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Di pasal lain, yaitu pasal 28C, ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya dalam pasal 31 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong



tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

4.1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah yang dicakup adalah rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk berumur 25 tahun untuk menjalani pendidikan formal.

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Sektor pendidikan sendiri menurut data IPM Indonesia yang dirilis oleh United Nation Development Program (UNDP) pada 2 November 2011 memberikan kontribusi sebanyak 0,58. Oleh karena itu sektor pendidikan memegang peranan penting dalam penghitungan IPM (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/164932>).

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, pemerintah menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil



angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan. Cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah.

Pemerintah telah menggulirkan beberapa program yang berkaitan dengan pendidikan. Program Bantuan Operasional Sekolah adalah salah satu program bantuan dari pemerintah kepada seluruh sekolah yang terdaftar resmi berupa bantuan biaya operasional sekolah. Program lainnya adalah Program Indonesia Pintar, yaitu program pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Dengan adanya program tersebut, diharapkan seluruh anak Indonesia dapat bersekolah.

Pada tahun 2021 IPM Kota Bandung mencapai 81,96. Angka ini meningkat 0,45 poin dibanding dengan IPM Kota Bandung Tahun 2020 yang mencapai 81,51. Angka IPM Kota Bandung ini merupakan IPM tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Bandung pada tahun 2021 adalah 10,99 tahun. Variabel lama sekolah ini mengalami kenaikan 0,24 tahun dari rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 yang mencapai 10,75 tahun. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung baru mengenyam pendidikan selama 10,99 tahun setara dengan kelas X di jenjang SMA.

Tabel 8. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Kota Bandung (Tahun), 2019-2021

Indikator Pendidikan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	14,19	14,20	14,21
Rata-rata lama sekolah (MYS)	10,74	10,75	10,99

Sumber: *ipm.bps.go.id*



Demikian pula dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 tahun untuk menempuh pendidikan. Pada tahun 2021, Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bandung mencapai 14,21 tahun, naik 0,01 tahun dari tahun 2020 yang sebesar 14,20. Ini berarti, pada tahun 2021 penduduk usia 7 tahun di Kota Bandung diharapkan dapat bersekolah selama 14,20 tahun.

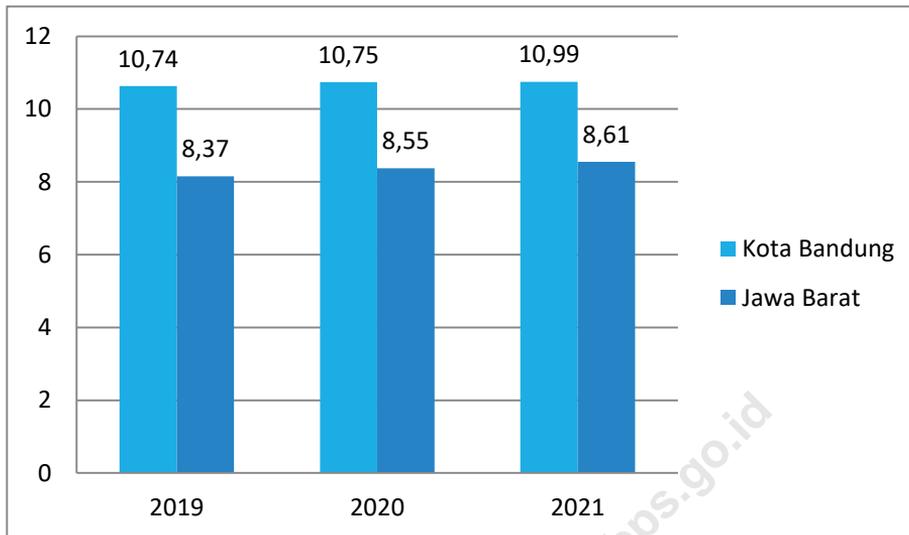
Tabel 9. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) (Tahun), Kota Bandung 2019 - 2021

Indikator Pendidikan	Kota Bandung			Jawa Barat		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Harapan Lama Sekolah	14,19	14,20	14,21	12,48	12,50	12,61
Rata-rata lama sekolah	10,74	10,75	10,99	8,37	8,55	8,61

Sumber: ipm.bps.go.id

Jika dibandingkan dengan Jawa Barat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kota Bandung di tahun 2021 berada di atas rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Jawa Barat. Terdapat selisih 1,60 tahun untuk angka harapan lama sekolah, dan 2,38 tahun untuk komponen rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2021 Angka Harapan Lama Sekolah Jawa Barat adalah 12,61 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah Jawa Barat adalah 8,61 tahun. Perbedaan ini tentu tidak lepas dari ketersediaan sarana pendidikan di Kota Bandung yang lebih lengkap dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Barat.

Grafik 7. Rata-rata Lama Sekolah, Kota Bandung 2019-2021 (Tahun)

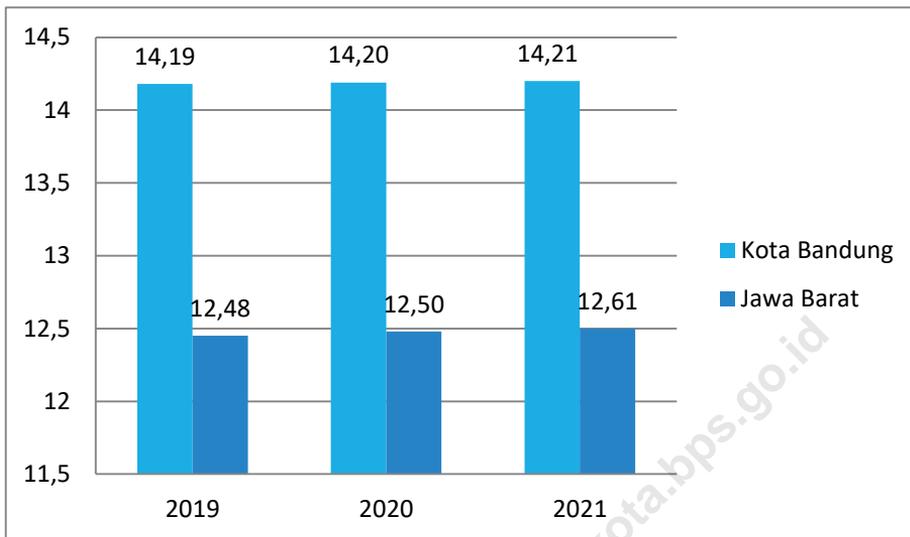


Sumber: www.jabar.bps.go.id

Tahun 2021, harapan lama sekolah Kota Bandung merupakan angka harapan lama sekolah tertinggi di Jawa Barat. Sedangkan rata-rata lama sekolah Kota Bandung merupakan rata-rata lama sekolah tertinggi keempat setelah Kota Depok (11,46 tahun), Kota Bekasi (11,31), dan Kota Cimahi (11,08).



Grafik 8. Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Bandung dan Jawa Barat, Tahun 2019-2021 (Tahun)



Sumber: www.jabar.bps.go.id

4.2. Partisipasi Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 10. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, Kota Bandung 2021

Karakteristik	Tidak/belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	0,00	28,93	11,99	32,38	26,70	100
Perempuan	NA	29,51	11,74	30,47	27,86	100
Kelompok Pengeluaran						
40 persen terbawah	NA	33,12	13,47	24,02	28,91	100
40 persen tengah	0,00	29,57	12,40	30,75	27,29	100
20 persen teratas	0,00	18,7	6,72	51,29	23,21	100
Kota Bandung	NA	29,22	11,87	31,43	27,28	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh penduduk yang berusia 7-24 tahun telah bersekolah. Status masih bersekolah memiliki persentase yang berbeda di setiap jenjangnya. Di Kota Bandung, rata-rata persentase untuk yang bersekolah di jenjang SD/ sederajat 29,22 persen, SMP/ sederajat 11,87 persen, SMA ke atas 31,43 persen. Sedangkan persentase untuk penduduk yang tidak bersekolah lagi adalah 27,28 persen.

Bila ditinjau dari segi kelompok pengeluaran, penduduk berumur 7-24 tahun dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah memiliki persentase sekolah tertinggi hanya untuk jenjang SD. Dari tabel di atas, penduduk dengan karakteristik tersebut 33,12 persen masih bersekolah di jenjang SD/ sederajat, 13,47 persen masih bersekolah di jenjang SMP/ sederajat. Pada jenjang SMA/ keatas, hanya sebesar 24,02 persen penduduk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang sekolah. Sedangkan untuk penduduk yang tidak bersekolah lagi adalah sebesar 29,91 persen. Jumlah tersebut paling tinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lain.

Sedangkan untuk penduduk 7-24 tahun dengan kelompok pengeluaran 40 persen tengah 29,57 persen di antaranya masih sekolah di jenjang SD/ sederajat. 12,40 persen



sedang bersekolah di jenjang SMP/ sederajat, 30,75 persen sedang bersekolah di jenjang SMA ke atas. Sisanya, yaitu 27,29 persen berstatus tidak bersekolah lagi.

Penduduk usia 7-24 tahun dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang berstatus masih bersekolah di jenjang SD/ sederajat adalah sebesar 18,78 persen, jenjang SMP/ sederajat sebesar 6,72 persen, dan SMA/ sederajat 51,29 persen. Jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SMA/ keatas tersebut paling banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok pengeluaran lainnya.

Persentase terbesar penduduk usia 7-24 tahun yang berstatus masih sekolah di jenjang SD/ sederajat berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Sedangkan persentase terkecil nya berasal dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Demikian pula untuk jenjang SMP/ sederajat. Sedangkan untuk jenjang SMA/ sederajat berlaku sebaliknya. Persentase terbesar penduduk usia 7-24 tahun yang berstatus masih sekolah di jenjang SMA ke atas berasal dari penduduk dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas.

Sedangkan persentase terbesar untuk status tidak bersekolah lagi berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Besar persentase tersebut tidak berbeda jauh dengan kelompok pengeluaran 40 persen tengah. Besaran persentase kedua kelompok tersebut lebih besar dari persentase status tidak bersekolah lagi Kota Bandung. Kelompok pengeluaran 20 persen teratas merupakan kelompok yang terkecil persentasenya di status tidak bersekolah lagi.

Perbedaan partisipasi sekolah dilihat dari kelompok pengeluaran menyiratkan masih adanya kesenjangan akses sekolah di masyarakat. Penduduk dengan kelompok 40 persen kebawah cenderung tidak banyak yang bersekolah ke jenjang SMA/ keatas. Hal ini perlu dievaluasi kembali penyebabnya. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan, pemerintah telah mewajibkan pendidikan wajib belajar dua belas tahun bagi warganya. Namun, masyarakat berpendapatan 40 persen terbawah mungkin memiliki pertimbangan lain untuk memutuskan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/ keatas. Hal ini tentu perlu



ditinjau, karena perbedaan ini akan menyebabkan penduduk yang tidak bersekolah lagi, baik karena bekerja, menikah, menganggur, sebagian besar berpendidikan rendah.

4.3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran dalam kesejahteraan. Secara umum tingkat pendidikan turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin luas pula pengetahuan dan keterampilannya. Dengan demikian akan dihasilkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Tabel 11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tertinggi, Kota Bandung 2021 (Persen)

Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Mempunyai Ijazah	1,47	2,53	2,00
SD/MI	14,02	17,03	15,52
SMP/Mts	20,78	20,45	20,62
SMA/SMK/MA	44,50	42,34	43,43
Diploma I dan Diploma II	0,28	0,47	0,38
Akademi/Diploma III	3,28	3,02	3,15
Diploma IV s.d S3	15,66	13,89	14,78

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat 2021

Pada tahun 2021 terdapat 43,43 persen penduduk usia di atas 15 tahun di Kota Bandung berijazah tertinggi SMA/SMK/MA. Pendidikan tertinggi kedua terbanyak yang ditamatkan oleh penduduk usia di atas 15 tahun di Kota Bandung adalah SMP/MTs disusul oleh SD/MI di tempat ketiga dengan nilai 15,52 persen. Ijazah pendidikan di atas jenjang SMA dimiliki oleh 18,31 persen penduduk Kota Bandung. Pada tahun 2021, terdapat 2,00 persen penduduk kota Bandung yang berusia di atas 15 tahun yang tidak mempunyai ijazah pendidikan sama sekali. Di Kota Bandung terdapat 3,53 persen penduduk yang

Pendidikan



memiliki ijazah Diploma I-III. Jumlah penduduk yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3 sebanyak 14,78 persen.

Jika dilihat dari perbedaan jenis kelamin, Ijazah tertinggi di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan DI s.d DII untuk persentase penduduk perempuan yang mengenyam pendidikan terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun, untuk jenjang pendidikan yang cukup tinggi yaitu pendidikan SMA/SMK/MA, persentase penduduk laki-laki lebih banyak yaitu 44,50 persen dibandingkan dengan persentase penduduk perempuan yang menerima ijazah jenjang tersebut yaitu hanya 42,34 persen. Selain itu, di jenjang DIV s.d S3, jumlah persentase penduduk laki-laki yang menerima ijazah tersebut lebih tinggi yaitu sebesar 15,66 persen, sementara jumlah penduduk perempuan yang menerima ijazah tersebut hanya sebesar 13,89 persen. Hal ini menunjukkan masih ada ketidaksetaraan gender dalam hal pendidikan di Kota Bandung. Pada jenjang pendidikan yang tinggi cenderung didominasi oleh laki-laki.

Pada tahun 2021, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Bandung yang memiliki ijazah SD sebanyak 15,52 persen. Persentase yang memiliki ijazah SMP sederajat sebesar 20,62 persen. Persentase terbanyak yaitu penduduk yang memiliki ijazah SMA keatas sebesar 61,74 persen. Selain itu, masih terdapat 2,00 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kota Bandung yang tidak memiliki ijazah.

Tabel 12. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki dan Kelompok Pengeluaran, Kota Bandung 2021 (Persen)

Kelompok Pengeluaran	Tidak punya ijazah SD	SD/sederajat	SMP/sederajat	SMA ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40 persen terbawah	2,56	22,06	25,20	50,18
40 persen tengah	2,09	14,16	21,23	62,53
20 persen teratas	0,92	7,22	11,94	79,92
Kota Bandung	2,00	15,52	20,62	61,87

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2021 (hal 25)



Ditinjau dari sisi pengeluaran, persentase terbesar penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Demikian pula untuk kepemilikan ijazah tertinggi di jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Namun pada kepemilikan ijazah di jenjang SMA ke atas, kelompok pengeluaran 40 persen terbawah merupakan kelompok yang paling sedikit memilikinya. Kelompok 20 persen teratas merupakan kelompok yang memiliki persentase terbesar yang memiliki ijazah SMA ke atas.

Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk kelompok 40 persen terbawah sebanyak 2,56 persennya tidak memiliki ijazah, sebanyak 22,06 persen memiliki ijazah SD/ sederajat, 25,20 persen memiliki ijazah SMP/ Sederajat dan sebesar 50,18 persen memiliki ijazah SMA ke atas. Penduduk kelompok 40 persen terbawah ini memiliki jumlah persentase penduduk yang memiliki ijazah SMA ke atas tertinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lain yang nilainya mencapai diatas 50 persen.

Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk kelompok pengeluaran 20 persen teratas hanya sekitar 0,92 persen yang tidak memiliki ijazah. Nilai tersebut merupakan nilai terendah dibandingkan dengan persentase kelompok pengeluaran lain. Sementara untuk persentase penduduk yang memiliki ijazah SMA ke atas, penduduk dengan kelompok pengeluaran ini menempati nilai yang tertinggi yaitu sebesar 79,92 persen. Persentase penduduk pengeluaran 20 persen teratas mayoritas telah memiliki ijazah SMA ke atas.

Gambaran di atas masih menunjukkan adanya kendala dalam menjalani proses pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah masalah sosial dan ekonomi (kemiskinan) yang ditunjukkan oleh perbedaan persentase lulusan pada kelompok pengeluaran. Selain itu, di samping faktor ekonomi, faktor persepsi masyarakat yang merasakan bahwa pendidikan bukan hal yang penting turut menghambat partisipasi pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang merata dan mudah dijangkau masyarakat serta

Pendidikan



memberikan penyelenggaraan pendidikan yang layak dari segala sisi di seluruh wilayah Kota Bandung mulai dari pusat Kota Bandung sampai wilayah pelosok Kota Bandung.

<https://bandungkota.bps.go.id>





BAB V KETENAGAKERJAAN

Salah satu misi Pemerintah Kota Bandung seperti yang tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 adalah membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Salah satu sasaran dalam pembangunan Kota Bandung adalah meningkatkan kesempatan kerja.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah pembangunan di Kota Bandung. Jumlah angkatan kerja yang besar di Kota Bandung belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja sehingga menciptakan pengangguran. Masalah pengangguran yang tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan masalah sosial yang lain.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) bulan Agustus 2021. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.



5.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Jumlah angkatan kerja merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Pengangguran terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha atau mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. Indikator untuk mengukur pengangguran biasanya disebut sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandung. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 2.050.398 orang, naik sebanyak 18.299 orang dari keadaan Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.339.128 orang (65,31 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Sebesar 65,31 persen angkatan kerja di Kota Bandung melakukan aktivitas bekerja. Bekerja di sini berarti melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama satu





jam tidak terputus seminggu yang lalu, juga termasuk kegiatan pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga yang membantu suatu kegiatan atau usaha ekonomi.

Tabel 13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung, 2019-2021 (persen)

Tahun	TPAK	TPT
(1)	(2)	(3)
2019	65,98	8,16
2020	64,71	11,19
2021	65,31	11,46

Sumber: Bandung Dalam Angka 2019-2021

TPAK Agustus 2021 Kota Bandung sebesar 65,31 persen. Artinya sebesar 65,31 persen penduduk Kota Bandung merupakan angkatan kerja dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk usia kerja. TPAK pada Agustus 2021 sebesar 65,31 persen, meningkat 0,60 persen poin dibandingkan Agustus 2020.

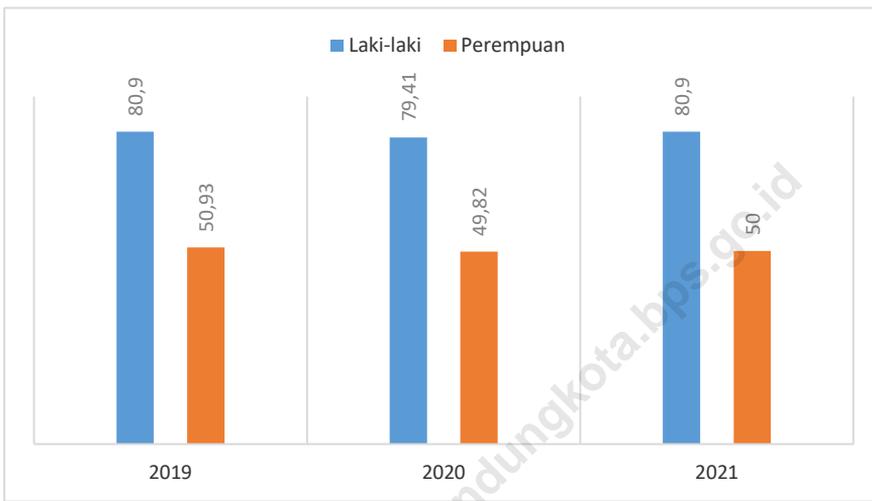
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 Kota Bandung sebesar 11,46 persen, Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 11,46 persen, naik 0,27 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Ini berarti 11,46 persen angkatan kerja Kota Bandung dalam keadaan tidak bekerja atau pengangguran. Terdapat 385.134 orang (18,78 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (40.803 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (11.428 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (17.288 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (315.615 orang).

Penambahan yang signifikan pada jumlah pengangguran di tahun 2020 ini tentu tidak lepas dari adanya pandemi yang terjadi di Indonesia. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak perekonomian terhadap masyarakat Indonesia. Pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah membuat berbagai pelaku usaha mengalami kerugian. Banyak pelaku usaha yang akhirnya terpaksa harus memutus kerja



para pegawainya agar perusahaan tidak defisit. Hal ini membuat banyak penduduk angkatan kerja yang kehilangan pekerjaannya. Beberapa angkatan kerja yang baru pun akhirnya sulit juga untuk mendapatkan pekerjaan.

Grafik 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung, 2019-2021 (persen)



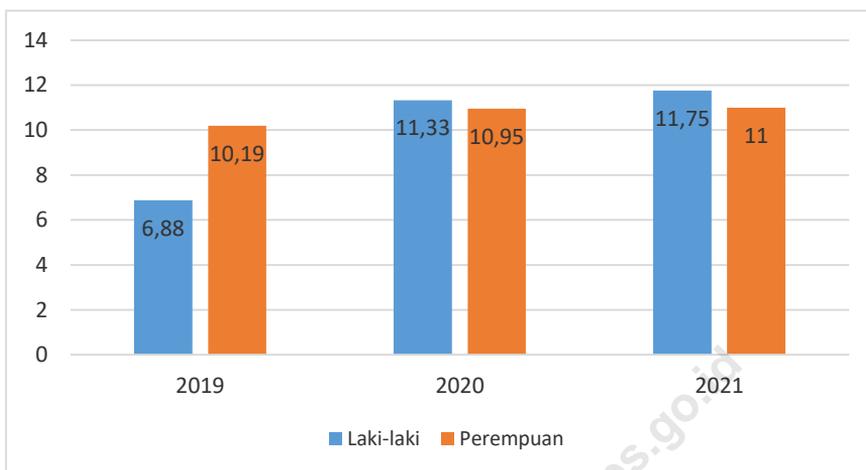
Sumber: Kota Bandung Dalam Angka 2019-2021

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa TPAC laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Pada tahun 2021, TPAC laki-laki sebesar 80,44 persen sedangkan TPAC perempuan sebesar 50,00 persen Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dalam aktivitas bekerja atau usaha ekonomi, sedangkan partisipasi perempuan masih rendah dalam kegiatan ekonomi.

TPAC penduduk laki-laki di Kota Bandung tahun 2021 naik dibanding tahun 2020 yang sebesar 79,41 persen. Demikian pula dengan TPAC penduduk perempuan di Kota Bandung tahun 2021 sebesar 50,00, naik 0,18 persen dibanding tahun 2020 yang 49,82 persen. Terjadinya kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ini dikarenakan sudah mulai membaiknya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia.



Grafik 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung 2019-2021



Sumber: Kota Bandung Dalam Angka 2019-2021

Sedangkan TPT menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan TPT perempuan. TPT laki-laki Kota Bandung tahun 2021 sebesar 11,75 persen, naik 0,42 poin dari 11,33 persen di tahun 2020. TPT penduduk laki-laki 2021 merupakan TPT tertinggi dalam tiga tahun terakhir, sedangkan TPT penduduk perempuan Kota Bandung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. TPT penduduk perempuan Kota Bandung tahun 2021 sebesar 11,00 persen naik 0,05 poin dari 10,95 persen di tahun 2020 dan seperti TPT laki-laki, TPT perempuan pun merupakan TPT tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

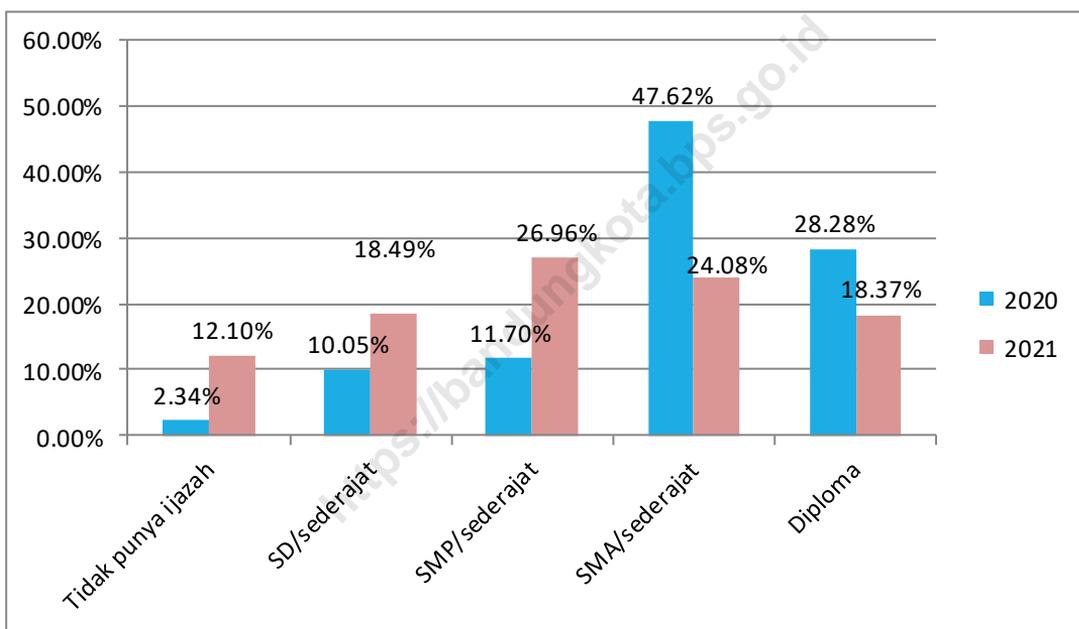
Peningkatan tingkat pengangguran di Kota Bandung menunjukkan bahwa banyak penduduk angkatan kerja yang kehilangan pekerjaannya terkait adanya pandemi yang berdampak besar terhadap perekonomian. Selain itu, lapangan kerja yang sudah ada tidak mencukupi untuk para pekerja baru atau mereka yang baru kehilangan pekerjaannya. Selain itu, Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja cenderung meningkat setiap tahun.



5.2. Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan disebutkan sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan pendidikan diharapkan dapat mendapat pekerjaan yang lebih baik. Namun bila jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan tenaga kerja yang ada, maka akan terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Tenaga kerja yang tidak bekerja maka akan menjadi pengangguran.

Grafik 11. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Bandung 2021 (persen)



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk pengangguran terbuka adalah berpendidikan tertinggi SMP sederajat. Selanjutnya yang merupakan kedua terbanyak adalah penduduk dengan pendidikan SMA Sederajat. Hal ini tidak terlepas dari jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SMA sederajat dan SMP sederajat merupakan jumlah angkatan kerja terbanyak. Namun lapangan kerja yang ada lebih sedikit dari jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Jika dibandingkan dengan kondisi 2020, persentase pengangguran terbuka yang berpendidikan SMA/ sederajat mengalami penurunan, yaitu 47,62 persen di tahun 2020





menjadi 24,08 persen di tahun 2021. Pengangguran terbuka yang berpendidikan diploma/universitas juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 18,37 persen di tahun 2021. Jumlah pengangguran dengan pendidikan diploma/universitas ini meningkat sesuai dengan meningkatnya lulusan baru angkatan kerja yang lebih banyak namun tidak disertai adanya lapangan kerja yang tersedia, terlebih lagi dalam situasi pandemi seperti ini.

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran terbuka dan berpendidikan SMP/ sederajat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu 11,70 persen di tahun 2020 menjadi 26,96 persen di tahun 2021. Pengangguran terbuka dengan pendidikan tertinggi SD/sederajat mengalami peningkatan dari 10,05 persen di tahun 2020 menjadi 18,49 persen di tahun 2021. Begitupun untuk pengangguran terbuka yang tidak berijazah mengalami peningkatan dari 2,34 persen di tahun 2020 menjadi 12,10 persen di tahun 2021.

Salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran pada penduduk berijazah SMA/SMK sederajat dan Diploma/Sarjana disebabkan karena ketimpangan antara jumlah industri yang tersedia di Kota Bandung dengan jumlah lulusan SMK dan jenjang di atasnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan dan membuka lapangan kerja agar dapat menyerap tenaga kerja dari kelompok ini.

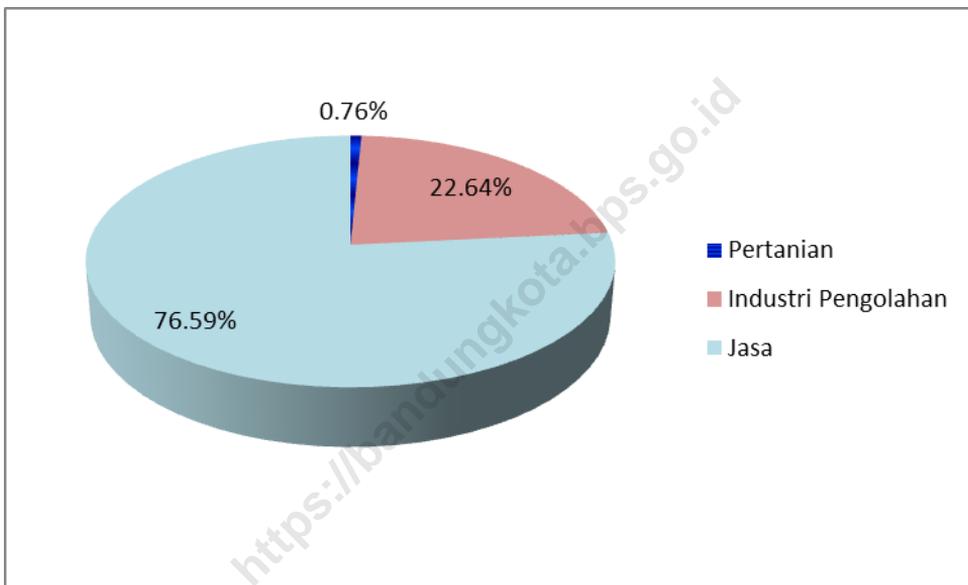
Pembaruan kurikulum pendidikan di semua jenjang diperlukan untuk mengangkat daya serap tenaga kerja di dunia kerja. Lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan diharapkan mampu mengikuti teknologi yang terus berkembang. Selain itu perlu pula pendidikan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha sehingga angkatan kerja yang ada selain dapat masuk ke dalam lapangan kerja namun dapat pula menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat.



5.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Manufactur; dan Jasa.

Grafik 12. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bandung 2021 (persen)



Sumber: Kota Bandung dalam Angka, 2021

Berdasarkan Grafik 12 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung bekerja di lapangan usaha Jasa. Persentase penduduk Kota Bandung yang berumur 15 tahun yang bekerja seminggu yang lalu di lapangan usaha Jasa mencapai 76,59 persen. Sedangkan lapangan usaha industri pengolahan menyerap 22,64 persen tenaga kerja di Kota Bandung. Lapangan usaha pertanian yang memang bukan lapangan usaha dominan di Kota Bandung hanya menyerap 0,76 persen angkatan kerja di Kota Bandung.

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaannya, penduduk Kota Bandung usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap atau

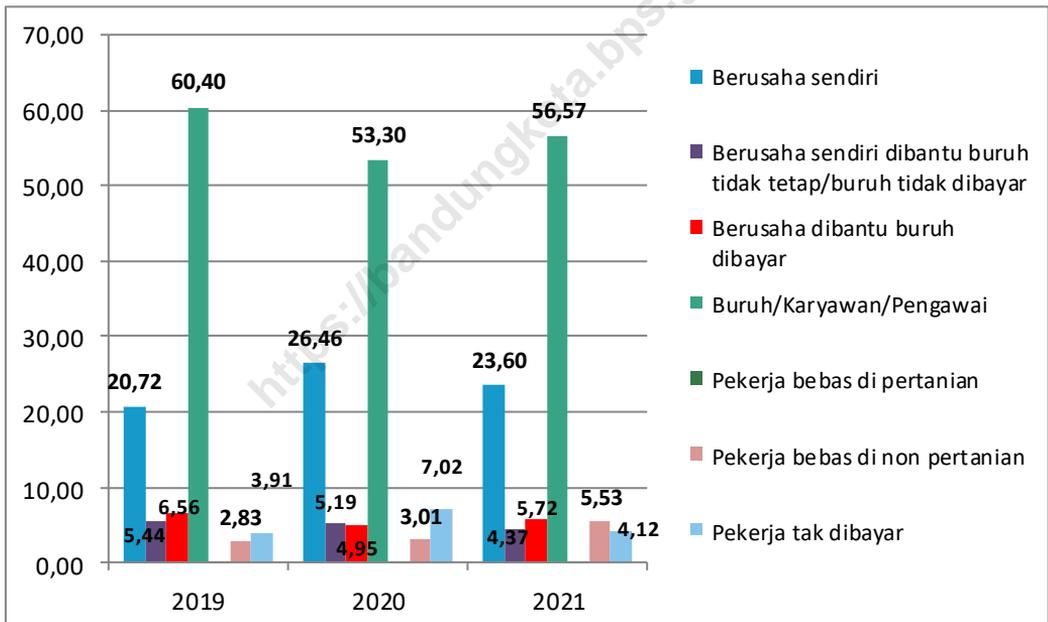




buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaannya, penduduk Kota Bandung usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Grafik 13. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Satus Pekerjaan Utama di Kota Bandung, 2019-2021 (persen)



Sumber: Kota Bandung dalam Angka, 2021

Status buruh/karyawan/pegawai adalah status pekerjaan utama yang paling banyak dimiliki oleh penduduk Kota Bandung yang bekerja. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan/ secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Pada tahun 2021,



persentase status pekerjaan utama ini mencapai 56,57 persen dari penduduk yang bekerja. Dibandingkan tahun 2020 yang persentasenya sebesar 53,30 persen, persentase ini meningkat sebesar 3,27 persen. Peningkatan jumlah penduduk yang berstatus buruh/karyawan/pegawai ini terkait dengan adanya pandemi Covid-19 yang mulai mereda membuat banyak perusahaan yang mulai merekrut kembali karyawannya untuk menstabilkan kondisi ekonomi perusahaan yang omsetnya terus menurun selama pandemi.

Status berusaha sendiri merupakan status pekerjaan utama kedua terbanyak di Kota Bandung. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Pada tahun 2021, status pekerjaan utama ini mencapai 23,60 persen. Persentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2020 yang sebesar 26,46 persen.

Persentase penduduk yang bekerja yang berusaha sendiri dengan dibantu buruh dibayar adalah sebesar 5,72 persen. Persentase ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang sebesar 4,95 persen. Peningkatan ini merupakan peningkatan yang sangat baik setelah mengalami penurunan yang cukup drastis terlebih tahun-tahun sebelumnya persentase penduduk yang berwirausaha ini selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini terjadi sehubungan dengan mulai meredanya pandemi covid-19 yang banyak membuat para wirausaha ini kesulitan secara finansial hingga akhirnya mengalami kebangkrutan.

Pada tahun 2021, di Kota Bandung penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, baik sendiri, dibantu buruh dibayar, dan dibantu buruh tidak dibayar, mencakup 33,68 persen. Persentase ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 36,60 persen. Keberadaan wirausaha ini sangat penting karena dapat turut meningkatkan roda perekonomian Kota Bandung. Para wirausahawan mampu





membuat lapangan kerja secara mandiri, tidak menunggu pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Pekerja bebas di lapangan usaha non pertanian sedikit meningkat di tahun 2021. Persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai pekerja bebas di lapangan usaha non pertanian tahun 2021 adalah 5,53 persen sedangkan di tahun 2020 sebesar 3,01 persen. Sedangkan pekerja bebas di pertanian meningkat menjadi 0,10 persen. Para pekerja bebas perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pekerja bebas memiliki pekerjaan yang tidak tetap membuat rentan untuk kehilangan pekerjaan. Keberadaan proyek pembangunan biasanya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan status pekerjaan ini. Sedangkan pekerja bebas di pertanian biasanya sangat tergantung pada cuaca, sehingga di saat cuaca tidak mendukung proses tanam, maka pekerja bebas di lapangan usaha ini akan kehilangan mata pencahariannya.

5.4. Sektor Formal dan Sektor Informal

Konsep informal yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada kesepakatan dalam ICLS ke-17 (17th *International Conference on Labor Statisticians*) tahun 2003. Sektor informal adalah sekelompok unit produksi yang merupakan bagian dari sektor rumah tangga, atau apa yang disebut sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (*Household Unincorporated Enterprise*).

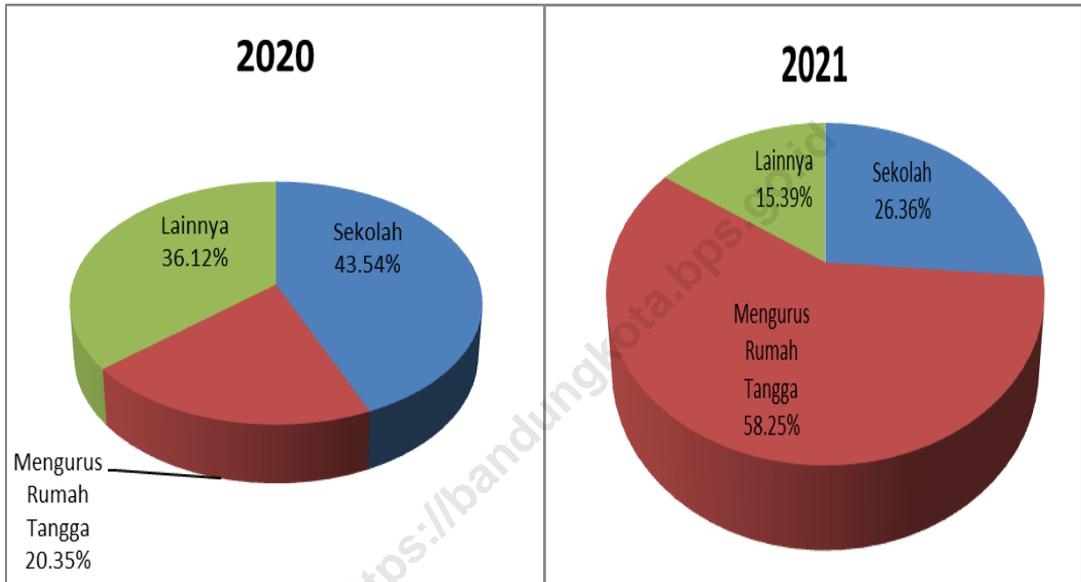
ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja informal sebagai "karyawan dianggap memiliki pekerjaan informal jika hubungan kerja mereka tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja (seperti pemberitahuan pemecatan sebelumnya, sistem pembayaran gaji tanpa rincian/nota, atau tiadanya hak cuti, ijin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk konsep pekerjaan dan bukan untuk tenaga kerja karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: (1) berusaha sendiri informal dan (2) pekerja upahan informal yang dipekerjakan di usaha formal atau informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan ketenagakerjaan



atau perlindungan sosial. Adapun yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008).

Grafik 14. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Bukan Angkatan Kerja di Kota Bandung 2020-2021 (persen)



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2020

Penduduk yang tidak bekerja di Kota Bandung baik yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya meningkat drastis dari tahun 2020 ke 2021. Pada tahun 2021 persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bersekolah di Kota Bandung mencapai 26,36 persen, menurun dibanding tahun 2020 yang sebesar 43,54 persen. Pada tahun 2021 persentase penduduk berumur 15 tahun keatas lainnya di Kota Bandung mencapai 15,39 persen, menurun dibanding tahun 2020 yang sebesar 36,12 persen. Selain itu, persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang mengurus rumah tangga di Kota Bandung menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Pada tahun 2020, persentase yang mengurus rumah tangga sebesar 20,35 persen. Nilai



tersebut meningkat cukup drastis di tahun 2020 menjadi 58,25 persen. Peningkatan ini terkait dengan adanya pandemi Covid-19 tahun 2020 yang membuat masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian terutama mereka yang bekerja di sektor pariwisata terkait dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

<https://bandungkota.bps.go.id>



BAB VI PERUMAHAN

Menurut Undang-Undang no 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Rumah sendiri memiliki arti sebagai tempat untuk melepas lelah, beristirahat setelah penat melaksanakan kewajiban sehari-hari, sebagai tempat bergaul dengan keluarga, sebagai tempat untuk melindungi diri dari bahaya, sebagai tempat menyimpan kekayaan (Azwar,1996).

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok disamping kebutuhan pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu keadaan perumahan dan lingkungannya dapat memberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga diantaranya dapat dilihat dari kualitas material yang mencakup jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan. Untuk melihat bagaimana kondisi suatu rumah dapat dilihat dari luas lantai yang cukup memadai sehingga dapat memberikan kenyamanan serta udara Segar bagi pemiliknya. Di samping itu dilihat pula fasilitas lain yang berkaitan dengan sarana kesehatan seperti sumber air minum, jamban/kaskus, serta sumber penerangan yang digunakan.

Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.



6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Menurut Departemen Kesehatan RI, rumah sehat merupakan bangunan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah. Sehingga dapat dikatakan bahwa rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial sehingga seluruh anggota keluarga dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Ada beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Tabel 14. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Bandung 2020 -2021 (Persen)

Indikator	2020	2021
(1)	(3)	(4)
Atap beton, genteng, dan seng (%)	97,48	85,87
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	100,00	100,00
Rata-rata luas lantai per kapita ≥ 10 m ² (%)	59,79	66,69

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2020-2021

Berdasarkan hasil Susenas 2020, sebagian besar rumah di Kota Bandung telah beratap beton, genteng dan seng. Demikian pula dengan dinding rumah, keseluruhan rumah tangga di Kota Bandung telah berdidinding terluas tembok. Namun demikian



masih terdapat 14,13 persen rumah dengan atap bukan beton, genteng, dan, seng. Rumah tangga ini perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kualitas hunian mereka.

Berkaitan dengan rumah sehat, WHO (Badan Kesehatan Dunia) merekomendasikan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Selanjutnya menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan rumah sehat jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² oleh karena data hasil susenas tahun 2021 menunjukkan bahwa di Kota Bandung mengalami kenaikan rata rata luas lantai perkapita dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 terdapat 66,69 persen rumah tangga yang memiliki luas lantai per kapita diatas 10 m², naik dari tahun 2020 yang sebesar 59,84 persen.

Semakin kecilnya luas lantai per kapita pada sebuah rumah tangga menunjukkan bahwa luas rumah yang ditempati tidak sebanding dengan banyaknya orang yang menghuni rumah tinggal tersebut.

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologis di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Persyaratan kesehatan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu sendiri sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat (Sanropie, 1992).

Adapun persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) no 829/Menkes/SK/VII/1999 sebagai berikut: lokasi tanah atau bangunan, kualitas udara, kualitas tanah, prasarana dan sarana lingkungan, vektor penyakit, penghijauan, bahan bangunan, komponen dan penataan ruangan, pencahayaan, kualitas udara, penyediaan air dan pembuangan limbah. Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga





dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 15. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kota Bandung 2020-2021 (persen)

Indikator Kualitas Perumahan	Tahun	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Air Kemasan, isi ulang dan air Ledeng	83,04	89,18
Air Minum Bersih	90,23	93,85
Jamban Sendiri	77,42	80,33
Jamban Sendiri dengan tangki septik	41,80	42,36
Sumber Penerangan Listrik PLN	99,73	99,78

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2020-2021

Berdasarkan hasil Susenas 2021 tercatat rumah tangga yang menggunakan air kemasan, isi ulang dan air ledeng sebagai sumber air minum di Kota Bandung adalah sebanyak 89,18 persen. Ini memperlihatkan adanya kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 83,04 persen. Selain itu tercatat 93,85 persen rumah tangga di Kota Bandung telah menggunakan air minum bersih.

Untuk penggunaan jamban, terdapat 80,33 persen rumah tangga telah menggunakan jamban sendiri sedangkan masih ada yang menggunakan jamban bersama (17,48%), MCK (2,19%), namun sudah tidak ada yang menggunakan jamban ketika buang air besar.

UNICEF menyatakan bahwa sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk, serta minum air yang tidak aman berkontribusi terhadap 88% kematian anak akibat diare di seluruh dunia (Kemenkes RI) dari semua kematian yang berakar pada buruknya kualitas air dan sanitasi, diare merupakan penyebab kematian terbesar.



Perlu diperhatikan bahwa rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai pembuangan akhir tinja hanya meliputi 42,36 persen dari seluruh rumah tangga di Kota Bandung. 9,41 persen menggunakan IPAL, dan selebihnya yaitu 48,23 persen rumah tangga tidak menggunakan tangki septik dan IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinjanya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pencemaran sungai di Kota Bandung.

Fasilitas perumahan lain yang tak kalah penting adalah listrik. Listrik telah menjadi kebutuhan utama rumah tangga. Dalam hal ini, hampir seluruh rumah tangga di Kota Bandung menggunakan PLN sebagai sumber penerangan utama.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Semakin banyak rumah tangga yang menempati rumah tinggal milik sendiri, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Tabel 16. Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tangga di Kota Bandung 2020-2021 (persen)

Indikator	2020	2021
(1)	(3)	(4)
Milik sendiri	51,72	53,66
Lainnya	48,28	46,34

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2020-2021



Berdasarkan hasil Susenas 2021, bahwa rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di Kota Bandung adalah sebesar 53,66 persen. Sedangkan sisanya menempati rumah dengan status kontrak, rumah dinas, bebas sewa ataupun status kepemilikan lainnya. Meningkatnya persentase rumah tangga dengan cara selain milik sendiri dapat dikarenakan sebagian dari mereka menetap hanya untuk sementara, seperti karena tugas pekerjaan, kuliah/sekolah, ataupun yang lainnya. Namun ada juga yang memang karena kondisi ekonomi yang belum mapan untuk memiliki rumah sendiri dan juga harga rumah yang cukup mahal di ibukota Jawa Barat ini, sehingga mereka memilih untuk kontrak/sewa.

<https://bandungkota.bps.go.id>



BAB VII TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi adalah suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan konsumsi. Pola konsumsi bisa diartikan sebagai jumlah persentase dari distribusi pendapatan terhadap masing-masing pengeluaran pangan, sandang, jasa-jasa serta rekreasi dan hiburan. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

7.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan atas dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran non makanan (non pangan). Pengeluaran rumah tangga sering digunakan sebagai proksi dari pendapatan rumah tangga. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu



alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 17. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bandung, 2019-2021

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp.)			Persentase (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Padi-padian	60.242	63.215	66.387	3.05	3.23	3.19
2. Umbi-umbian	7.796	7.565	8.633	0.39	0.39	0.41
3. Ikan	45.404	42.795	45.143	2.30	2.18	2.17
4. Daging	48.806	54.315	60.710	2.47	2.77	2.92
5. Telur dan Susu	47.734	54.348	55.508	2.42	2.77	2.67
6. Sayur-sayuran	40.701	45.214	53.473	2.06	2.31	2.57
7. Kacang-kacangan	16.064	17.383	19.863	0.81	0.89	0.95
8. Buah-buahan	37.472	43.615	40.076	1.90	2.23	1.92
9. Minyak dan lemak	13.891	14.598	16.331	0.70	0.75	0.78
10. Bahan minuman	22.301	23.888	27.128	1.13	1.22	1.30
11. Bumbu-bumbuan	13.829	15.149	17.937	0.70	0.77	0.86
12. Konsumsi lainnya	13.774	15.942	20.219	0.70	0.81	0.97
13. Makanan dan minuman jadi	316.492	349.286	343.758	16.03	17.83	16.51
14. Rokok	85.352	78.066	90.904	4.32	3.99	4.37
Makanan	769.859	825.379	866.068	38.99	42.14	41.59
1. Perumahan	630.298	570.016	663.442	31.92	29.10	31.86
2. Barang dan jasa	312.500	284.975	306.082	15.83	14.55	14.70
3. Pakaian	56.467	54.553	42.231	2.86	2.78	2.03
4. Barang tahan lama	90.126	107.348	86.294	4.56	5.48	4.14
5. Pajak	63.264	60.325	83.294	3.20	3.08	4.00
6. Lainnya	51.825	56.245	34.964	2.62	2.87	1.68
Bukan Makanan	1.204.480	1.133.462	1.216.307	61.01	57.86	58.41
Jumlah	1.974.339	1.958.841	2.082.375	100.00	100.00	100.00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2018-2020

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Bandung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.082.375.- yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp 866.068.- dan Rp. 1.216.307.- untuk pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran per kapita penduduk Kota Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pengeluaran tahun 2021 mengalami



peningkatan sebesar Rp 123.534.-. Padahal tahun sebelumnya pengeluaran mengalami penurunan seperti pada tahun 2019 pengeluaran yang terjadi sebesar Rp 15.498.-.

Pada tahun 2021, pengeluaran makanan mencakup 41.59 persen dari seluruh pengeluaran konsumsi penduduk Kota Bandung. Persentase ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan penduduk Kota Bandung tahun 2020 adalah sebesar 42.14 persen. Pada tahun 2019 ke 2020 jumlah pengeluaran makanan justru mengalami peningkatan dari 38.99 persen menjadi 42.14 persen. Hal yang berbeda terjadi pada pengeluaran bukan makanan yang justru mengalami peningkatan pada tahun 2020 ke tahun 2021. Pengeluaran bukan makanan tahun 2020 yaitu sebesar 57.86 persen. Jumlah tersebut menurun di tahun 2021 menjadi sebesar 58.41 persen. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 ke 2020 persentase pengeluaran non makanan justru menurun dari 61.01 persen menjadi 57.86 persen.

Pengeluaran sub kelompok makanan penduduk Kota Bandung untuk jenis makanan dan minuman jadi merupakan porsi tertinggi dibandingkan dengan jenis makanan lainnya, yaitu sebesar 16.51 persen pada tahun 2021. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 17.83 persen. Pada tahun 2019 ke 2020 jumlah ini justru mengalami peningkatan dari 16.03 persen menjadi 17.83 persen.

Pengeluaran sub kelompok rokok merupakan pengeluaran konsumsi terbesar kedua di antara sub kelompok makanan lainnya. Pada tahun 2021 persentase pengeluaran tembakau dan sirih mencakup 4.37 persen dari seluruh pengeluaran konsumsi penduduk Kota Bandung. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3.99 persen.

Pengeluaran kelompok ketiga terbesar adalah pengeluaran sub kelompok padi-padian. Pada tahun 2021 pengeluaran padi-padian mencapai 3.19 persen dari seluruh pengeluaran konsumsi penduduk di Kota Bandung. Persentase ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3.23 persen. Pengeluaran sub kelompok padi-padian mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2020.





Pada tahun 2019 pengeluaran sub kelompok ini tercatat sebesar 3.05 persen kemudian menjadi 3.23 persen di tahun 2020.

Dalam waktu tiga tahun terakhir, pengeluaran bukan makanan didominasi oleh pengeluaran sub kelompok perumahan. Sub kelompok ini terdiri dari pengeluaran kontrak/sewa rumah, pemeliharaan rumah, biaya listrik, biaya air, biaya kendaraan bermotor, bahan bakar, dan biaya pos telekomunikasi. Persentase pengeluaran sub kelompok ini mengalami kenaikan persentase pada tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu 31.92 persen pada tahun 2019 dan 29.10 persen pada tahun 2020. Lalu persentase ini meningkat menjadi 31.86 persen di tahun 2021.

Pengeluaran sub kelompok barang dan jasa merupakan pengeluaran non makanan terbesar kedua. Pada tahun 2021 persentase pengeluaran kelompok ini mencapai 14.70 persen, meningkat dari persentase di tahun 2020 yang sebesar 14.55 persen. Pengeluaran sub kelompok ini di antaranya terdiri dari pengeluaran alat kebersihan pribadi dan lingkungan. pengeluaran kesehatan. biaya pendidikan. biaya hiburan. dan lainnya.

Pengeluaran konsumsi dapat pula dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan pengeluarannya. rumah tangga dibagi menjadi 40 persen pengeluaran terbawah. 40 persen pengeluaran tengah dan 20 persen pengeluaran teratas. Pola konsumsi untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga memiliki pola yang berbeda.

Rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah membelanjakan Rp.442.543,- pengeluarannya untuk pengeluaran makanan. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga maka semakin kecil proporsi pengeluaran makanan. Kelompok pengeluaran 40 persen tengah mengeluarkan Rp.937.926,- pengeluarannya untuk makanan. Sedangkan kelompok pengeluaran 20 persen teratas hanya mengeluarkan Rp.1.568.421,- untuk pengeluaran makanan.

Secara umum, kelompok makanan jadi merupakan pengeluaran konsumsi terbesar di semua kelompok rumah tangga. Rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen



terbawah memiliki pengeluaran makanan/minuman jadi sebesar Rp.149.318,-. Sedangkan rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen tengah membelanjakan Rp.364.018,- dari pengeluarannya untuk makan dan minuman jadi. Persentase di kelompok 20 persen teratas membelanjakan Rp.691.730,- dari pengeluarannya untuk makan dan minuman jadi.

Tabel 18 Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga Di Kota Bandung (Rupiah), 2021

Jenis Pengeluaran	Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen atas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Padi-padian	52.721	71.768	82.910
2. Umbi-umbian	4.321	9.551	15.410
3. Ikan	19.492	49.812	87.044
4. Daging	28.763	59.472	127.041
5. Telur dan Susu	25.474	60.201	106.125
6. Sayur-sayuran	29.009	61.079	87.115
7. Kacang-kacangan	12.313	23.432	27.792
8. Buah-buahan	13.828	43.324	86.022
9. Minyak dan lemak	10.192	18.392	24.468
10. Bahan minuman	14.463	32.860	40.944
11. Bumbu-bumbuan	9.511	19.632	31.377
12. Konsumsi lainnya	12.766	23.816	27.899
13. Makanan dan minuman jadi	149.318	364.018	691.730
14. Tembakau dan sirih	60.372	100.570	132.543
Makanan	442.543	937.926	1.568.421

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung. 2021

Pengeluaran rokok dan tembakau per kapita merupakan pengeluaran terbesar kedua di seluruh kelompok dengan pengeluaran terbesar adalah kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yaitu Rp. 60.372,-. Demikian pula dengan pengeluaran per kapita



untuk padi-padian yang sebesar Rp.52.721,- merupakan pengeluaran terbesar ketiga di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan kelompok pengeluaran 40 persen tengah.

Pengeluaran sub kelompok makanan di pengeluaran 20 persen teratas sedikit berbeda dengan dua kelompok pengeluaran lainnya. Pengeluaran daging adalah pengeluaran terbesar ketiga di kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Sedangkan pengeluaran ketiga terbesar di dua kelompok lainnya adalah padi-padian. Di kelompok 20 persen teratas, pengeluaran untuk padi-padian hanya sebesar Rp. 82.910, lebih kecil dari pada pengeluaran daging, telur, ikan dan buah.

Sedangkan pengeluaran bukan makanan sebagian besar dilakukan oleh kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Cakupan pengeluaran bukan makanan untuk kelompok tersebut sebesar Rp. 3.488.889. Sedangkan untuk kelompok 40 persen tengah sebesar Rp.961.773,- dan untuk pengeluaran 40 persen terbawah sebesar Rp. 334.526,-. Kelompok 20 persen teratas memiliki persentase terbesar untuk seluruh komponen pengeluaran bukan makanan dibanding dua kelompok pengeluaran lainnya.

Tabel 19. Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Bandung, 2021 (Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Persentase (Rupiah)		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen atas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Perumahan	217.776	578.734	1.723.951
2. Barang dan jasa	76.413	218.325	941.026
3. Pakaian	11.955	40.390	106.431
4. Barang tahan lama	4.905	33.386	355.029
5. Pajak	21.383	71.221	231.229
6. Lainnya	2.095	19.717	131.223
Bukan Makanan	334.526	961.773	3.448.889
Jumlah	777.069	1.899.699	5.057.310

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2021



Barang dan Jasa merupakan komponen pengeluaran terbesar kedua untuk seluruh kelompok pengeluaran. Jumlah pengeluaran barang dan jasa di kelompok 20 persen teratas lebih dua belas kali lebih besar dari pengeluaran barang dan jasa di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Perbedaan juga ditunjukkan di komponen barang tahan lama. Pengeluaran barang tahan lama di kelompok 20 persen teratas mencapai Rp.355.029,- sementara kelompok 40 persen terbawah hanya Rp.4.905,- dan kelompok 40 persen tengah hanya Rp.33.386,

Pengeluaran pakaian tidak terlalu berbeda antar kelompok pengeluaran. Kelompok 40 persen terbawah membelanjakan Rp.11.955,- pengeluarannya untuk pakaian dan perlengkapannya. Pengeluaran pakaian di kelompok pengeluaran 40 persen tengah adalah sebesar Rp.40.390,- dan pengeluaran di kelompok 20 persen teratas adalah sebesar Rp.106.431,-.

7.2. Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut.

Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012) rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

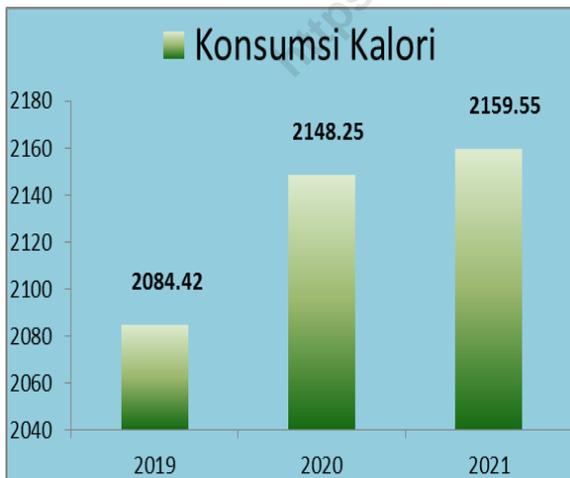
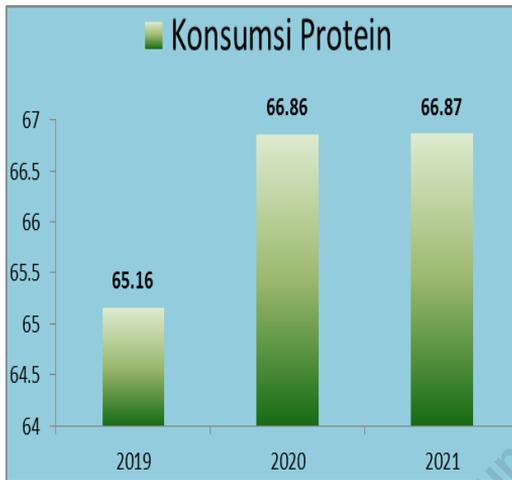
Rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Kota Bandung per kapita per hari cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 rata-rata konsumsi kalori penduduk Kota Bandung per hari sebesar 2.159,55 kkal. naik





dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 2.148,25 kkal. Sedangkan konsumsi protein per hari adalah 66,87 gram, naik dari konsumsi di tahun 2020 yang sebesar 66.86 gram. Jumlah konsumsi kalori dan protein ini meningkat.

Grafik 15. Rata-rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (gram) Per Kapita Sehari di Kota Bandung, 2019-2021

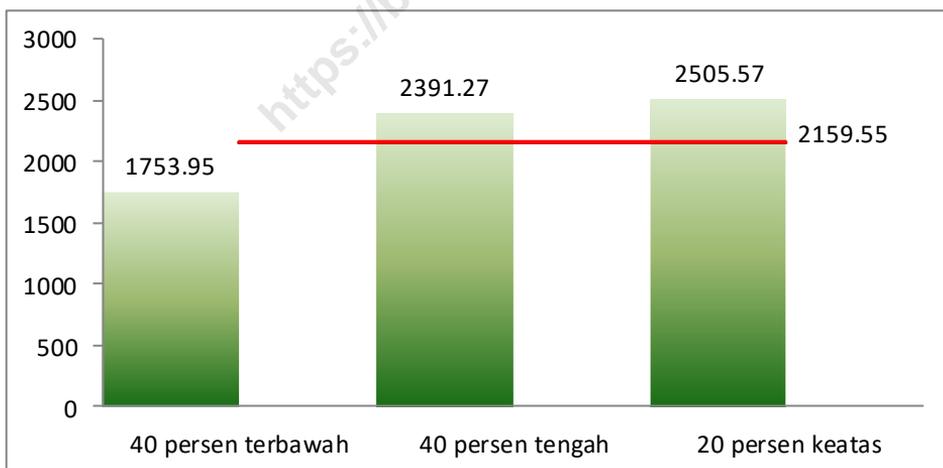




Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung. 2019-2021

Di tahun 2021, rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari untuk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah adalah 1.753,95 kkal. Konsumsi ini merupakan konsumsi paling kecil dibandingkan dua kelompok lainnya. Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari untuk kelompok pengeluaran 40 persen tengah dan 20 persen atas adalah 2.391,27 kkal dan 2.505,57 kkal. Jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari Kota Bandung, rata-rata konsumsi kalori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah berada di bawah rata-rata Kota Bandung. Sedangkan rata-rata konsumsi kalori per kapita per harinya untuk dua kelompok pengeluaran lainnya berada di atas rata-rata konsumsi Kota Bandung.

Grafik 16. Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Bandung. 2021 (Kkal)

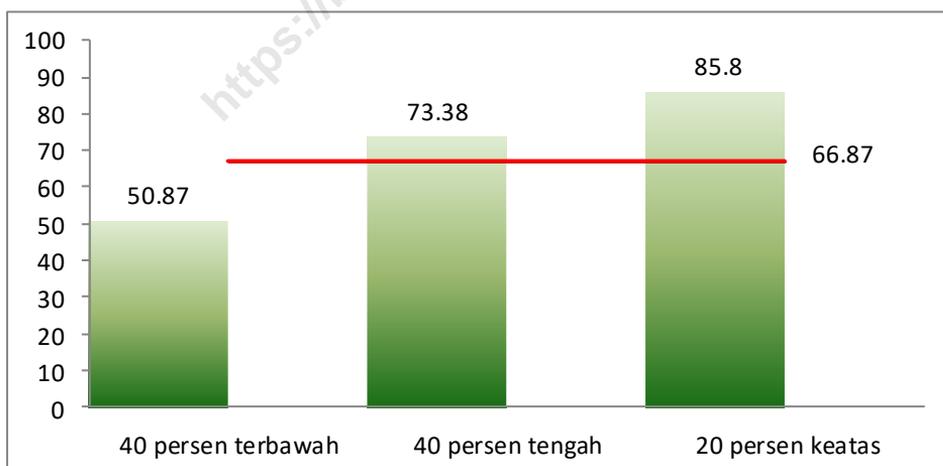


Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2021



Pada tahun 2021, rata-rata konsumsi protein per kapita per harinya juga berbeda antar kelompok pengeluaran. Sama seperti konsumsi kalori, rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah mengkonsumsi protein paling sedikit dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya. Rata-rata konsumsi protein per kapita per harinya di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah adalah 50,87 gram, lebih rendah dari rata-rata konsumsi protein Kota Bandung yang sebesar 66.87 gram. Rumah tangga dengan pengeluaran 20 persen teratas mengkonsumsi protein paling tinggi yaitu 85,80 gram per kapita per harinya. Baik kelompok pengeluaran 40 persen tengah dan 20 persen atas. rata-rata konsumsinya berada di atas rata-rata konsumsi protein Kota Bandung.

Grafik 17. Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari di Kota Bandung, 2021 (Gram)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2021

Jika dibandingkan dengan kecukupan akan energi dan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. di mana energi yang diperlukan oleh tubuh

Taraf dan Pola Konsumsi



manusia adalah 2.100 kkal per kapita per hari dan kebutuhan protein adalah 57 gram per kapita per hari, maka terdapat kondisi yang berbeda antara konsumsi kalori protein dan kalori penduduk Kota Bandung. Secara umum, penduduk Kota Bandung mengkonsumsi kalori sedikit lebih besar daripada yang direkomendasikan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Sedangkan konsumsi protein, secara rata-rata telah memenuhi rekomendasi sebesar 57 gram per harinya. Rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah mengkonsumsi kalori dan protein di bawah rekomendasi yang diberikan. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam mendapatkan kalori dan protein di masyarakat. Kurangnya kalori dan protein akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kualitas dari penduduk.

<https://bandungkota.bps.go.id>





BAB VIII SOSIAL LAINNYA

Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya di antaranya adalah akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi. akses masyarakat terhadap layanan usaha. perjalanan wisata dan tingkat keamanan wilayah. Dalam bab ini akan di bahas mengenai akses informasi dan komunikasi serta akses kredit.

Perkembangan teknologi menjadi hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan masa kini. Berbagai layanan masyarakat seperti pun sudah beralih dari metode konvensional menjadi digital. seperti jual beli. layanan pembayaran. dan sebagainya. Era digital menjadikan media sosial menjadi ajang sosialisasi dengan dunia luar.

Akses pada teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar (*smartphone*) dan komputer. Harga telepon pintar (*smartphone*) yang semakin terjangkau dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi.

8.1 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia. penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang di Kota Bandung. Kontribusi lapangan usaha Informasi dan Teknologi pada perekonomian naik di tahun 2021 menjadi 14,279 persen. Pada tahun 2021 nilai tambah lapangan usaha ini mencapai 43.934 miliar rupiah.

Alat yang sering digunakan untuk mengakses informasi dan komunikasi adalah telepon selular dan laptop. Pada tahun 2021 di Kota Bandung tercatat 92,45 persen anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menggunakan telepon seluler/nirkabel/computer/laptop. Anggota rumah tangga laki laki lebih banyak



menggunakannya dibanding anggota rumah tangga perempuan. yaitu 93,30 persen untuk anggota rumah tangga laki-laki dan 87,56 persen untuk penduduk perempuan.

Akses internet di Kota Bandung cukup tinggi. Dari data Susenas 2021 diketahui bahwa akses internet dilakukan oleh 88,51 persen anggota rumah tangga usia 5 tahun ke atas. Persentase ini meningkat dibandingkan persentase akses internet di tahun 2019 yang sebesar 76,73. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung sudah terbiasa dengan internet.

Tabel 20 Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet 3 Bulan Terakhir Menurut Karakteristik di Kota Bandung, 2020-2021

Kelompok Pengeluaran	Akses Internet	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Kuintil Pengeluaran		
40 persen terbawah	67,09	84,62
40 persen tengah	80,46	89,17
20 persen atas	87,60	94,51
Pendidikan Tertinggi ART		
SD ke bawah	49,95	74,53
SMP ke atas	90,63	92,54
Kota Bandung	76,73	88,51

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung 2020-2021

Jika dilihat berdasarkan pengeluarannya. seluruh penduduk usia 5 tahun ke atas di semua kelompok pengeluaran mengalami kenaikan persentase. Kenaikan terbesar berada di kelompok 40 persen terbawah. Pada tahun 2021, persentase anggota rumah tangga di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang mengakses internet mencapai 84,62 persen, naik dari persentase 2020 yang sebesar 67,09 persen.



Anggota rumah tangga yang termasuk 20 persen teratas mengakses internet terbesar dibandingkan dua kelompok lainnya. Pada tahun 2021, akses internet yang dilakukan oleh anggota rumah tangga dengan pengeluaran tersebut mencapai 94,51 persen, di atas rata-rata Kota Bandung yang sebesar 88,51 persen.

Anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah mengakses internet lebih sedikit daripada anggota rumah tangga yang berpendidikan SMP ke atas, yaitu sebesar 74,53 persen. Persentase ini jauh lebih kecil dari anggota rumah tangga yang pendidikan SMP ke atas yang sebesar 92,54 persen. Namun demikian, anggota rumah tangga di kedua kelompok tersebut mengalami peningkatan akses internet dibandingkan dengan tahun 2019.

8.2 Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan hal penting di masyarakat. Keberadaan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar menjadikan perlindungan sosial masih diperlukan. Dalam undang-undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan diarahkan adar masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya.

Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa bentuk perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah di antaranya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). Program Indonesia Pintar (PIP). Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program Keluarga Harapan (PKH).

BNPT adalah bantuan sosial dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur yang dapat digunakan KPM untuk memberli beras di e-waroeng.



Program perlindungan sosial juga mencakup bidang pendidikan. Bantuan diberikan dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu bantuan tunai kepada anak usia sekolah (usia 6 -21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya memberi perlindungan sosial kepada keluarga miskin. Sasaran PKH adalah Keluarga miskin (KM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat.

Tabel 21. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial Yang Diterima di Kota Bandung Tahun 2020-2021 (Persen)

Jenis Program Perlindungan Sosial (1)	Persentase Rumah Tangga Yang Menerima	
	2020 (2)	2021 (3)
Raskin/Rastra/BNPT	4,11	11,33
Program Indonesia Pintar (PIP)	4,70	5,64
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	4,55	4,73
Program Keluarga Harapan (PKH)	3,65	6,48

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2020-2021

Dari data Susenas diketahui bahwa keluarga miskin di Kota Bandung mendapatkan perlindungan sosial berupa berbagai macam bentuk bantuan. Pada tahun 2021, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) diterima oleh 11,33 persen rumah tangga di Kota Bandung. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 4,11 persen.

Program Indonesia Pintar diterima oleh 5,64 persen rumah tangga di Kota Bandung. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, penerima bantuan KPS/KKS mencakup 4,73 persen dari rumah tangga di Kota Bandung. Persentase ini pun menunjukkan sedikit peningkatan dibanding persentase tahun sebelumnya yang sebesar 4,55 persen. Sedangkan bantuan program PKH diterima oleh



6,48 persen rumah tangga di Kota Bandung. Persentase rumah tangga penerima PKH di Kota Bandung meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 3,68 persen.

Perlindungan sosial memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perlindungan sosial, masyarakat kurang mampu akan memiliki akses yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian tidak ada satu warga masyarakat pun yang tidak mampu memenuhi keperluan dasar hidupnya.

<https://bandungkota.bps.go.id>

DATA

www.bandungkota.bps.go.id

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDUNG**

JL. Jendral Gatot Subroto No. 93 Bandung 40273

Telp/Fax: (022) 7305091

Homepage: <http://www.bandungkota.bps.go.id>